

**PEMAHAMAN WARTAWAN MEDIA CETAK MAKASSAR TERHADAP  
PENGUNAAN ISTILAH ANARKISME DALAM BERITA  
DEMONSTRASI MAHASISWA MAKASSAR. (Studi Kasus Terhadap  
Penulis Berita Aksi Penolakan Kenaikan BBM Mahasiswa Makassar)**

*Oleh :*

**HIMAS PUSPITO PUTRA**

**E31106026**



**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul Skripsi : **PEMAHAMAN WARTAWAN MEDIA CETAK  
MAKASSAR TERHADAP PENGGUNAAN ISTILAH  
ANARKISME DALAM BERITA DEMONSTRASI  
MAHASISWA MAKASSAR. (Studi Kasus Terhadap  
Penulis Berita Aksi Penolakan Kenaikan BBM  
Mahasiswa Makassar)**

Nama Mahasiswa : **Himas Puspito Putra**

Nomor Pokok : **E 311 06026**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Muliadi Mau, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 197012311998021002**

**Drs. Sudirman Karnay, M.Si**  
**NIP. 196410021990021001**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Dr. H. Muh. Farid, M.Si**  
**NIP. 196107161987021001**  
**HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI**

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna

memperoleh gelar kesarjanaan dalam Jurusan Ilmu Komunikasi Program Studi  
Jurnalistik. Pada hari Jumat 10 Januari 2014

Makassar, Januari 2014

#### **TIM EVALUASI**

- Ketua : Dr. Muh. Farid M.Si. ( )
- Sekretaris : Andi Subhan Amir S.Sos M.Si. ( )
- Anggota : 1. Drs. Sudirman Karnay, M. Si ( )
2. Muliadi Mau, S.Sos, M.Si ( )
3. Dr. Tuti Bahfiarti, S.Sos, M.Si ( )

#### **KATA PENGANTAR**

Tiada kalimat yang paling mulia patut penulis panjatkan selain ucapan  
rasa syukur Alhamdulillah atas segala nikmat *Ilahi Rabbil Alamin*. Atas rahmat

dan hidayah-Nya pula sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW, pada segenap keluarga dan sahabat-sahabatnya

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada segenap pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan kepada:

1. Bapak Dr. Muh. Farid M.Si dan Bapak Drs. Sudirman Karnay, M. Si selaku ketua dan sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Muliadi Mau, S.Sos, M.Si., selaku pembimbing I serta Bapak Drs. Sudirman Karnay, M. Si selaku pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis.
3. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Hafied Cangara, Prof. Andi Alimuddin Unde, Dr. M. Iqbal Sultan, Dr. Muh Abduh, Dr. Noer Jihad Saleh, Dr. Muh. Farid, Dr. Muh. Akbar, Dr. Hasrullah, Drs. Mustafa Laoccong, Drs. Abdul Gafar, M. Si, Drs. Kahar, M. Hum, Drs. Mursalim, M. Si, Drs. H. Aswar Hasan, M. Si, Drs. Syamsuddin Aziz, M. Phil, Alem Febri Sonni, S.sos, Andi Subhan Amir, S. Sos, Ustaz H. Das'ad latif S. Sos, M. Si, Ibu Dr. Jeanny Maria Fatimah dan Ibu Sitti Murniati Mukhtar, S. Sos, SH.
4. Terkhusus untuk para dosen sekaligus orang tua kami yang telah berpulang ke rahmatullah mendahului kita semua, Almarhum Bapak Dr. Mansyur Semma, Drs. A.R. Bulaeng, MS, dan Drs. Eddy Soejono, MA. Terima kasih telah berbagi ilmu untuk kami semua, semoga Allah SWT memberikan tempat yang terbaik, dan membalas semua amal ibadah dengan syurga yang dijanjikan bagi hambanya yang beriman. Kami akan selalu mengingat dan mengamalkan ilmu yang kalian ajarkan kepada kami.
5. Para Staf Akademik Fisip yang senantiasa membantu pengurusan berkas ujianku. Semoga kebaikan Kalian mendapatkan Ridho Allah.

6. Kakak-Kakak RUSH '04, GUARD '05, adik-adik CALISTO '07, EXIST '08, CURE '09, GREAT '10, URGENT 11, TREASURE 12 dan seluruh keluarga KOSMIK UNHAS, terima kasih atas semua bantuannya selama ini. Terima kasih telah menerima penulis dalam keluarga KOSMIK.UNHAS. salam Biru Merah.
7. Sahabat TRUST' 06 yang nama-namanya selalu ada di hati. Terima kasih untuk rasa kekeluargaan yang kalian berikan selama ini. Akhirnya bendera angkatan saya yang turunkan.
8. Sahabat serta saudara-saudaraku di KOWISMU 05, Adi, Wandu, Fadli, Zame, Ka' Sheri, Ka' Jupe', Ka' Ochank, Ka' Fajhie', Ka' Wawan, Ka' Chiwank, Ka' Budi, dan nama-nama lain yang tidak sempat tertulis. Terima kasih sudah jadi saudara paling dekat selama ini.
9. K'Bento, K'Riza, K'Harwan, K'Rahe, K'Patang, K'Jun, K'Aidil, K'Abe, Ka' Taro, Ka' Edy, Ka' Ema, Ka' Were, dan kanda-kanda senior yang belum sempat tertulis di halaman ini. Terima kasih atas bantuan dan sharing ilmu yang diberikan kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat dekat penulis, Joem, Eric, Pisang, Vivi, Wana, Mas Dandy, dan banyak lagi yang tidak disebutkan namanya. Terima kasih atas perhatian dan curahan doa yang kalian haturkan.
11. Keluarga dan kerabat dekat yang selama ini sangat membantu dalam penyelesaian studi penulis. Terima kasih doanya.
12. Sahabat TRUST seperjuangan Irwan, Rolly, Yuyu, Opan, Om Syahrul, Diman, Sari, Uttank, Wanto, Ain, Dody, Debra, Andi dan yang belum disebutkan namanya. Terima kasih sudah rela disusahi selama ini. Teman adalah kekuatan!
13. Keluarga besar Koran Tempo Makassar, Mas Dodong, Mba' Grace, Mas Reza Maulana, Mas Anto, Kak Irma, Kak Pay, Kak Kink, Aan, Iin, Ardi, Rahman, Yunus, Iqbal, dan yang belum sempat disebutkan namanya. Terima kasih atas pengalaman dan pengetahuan yang telah dibagi.

Terakhir dan yang paling utama skripsi ini kupersembahkan kepada Ayahanda tercinta (Alm) Himawan Kartiko Puspito dan Ibunda tercinta Siti

Aspiah, terima kasih atas ajaran tentang kemandirian, kerja keras, dan tuntunan agama yang kalian berikan pada penulis. Mohon maaf telah banyak membebankan hidup dan tetap tegar walaupun terus dipusingkan oleh banyak keinginan dari penulis. Semoga Allah SWT terus memberikan kesehatan dan keselamatan-NYA dunia akhirat kelak amin.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu penulis sangat mengharapkan masukan dan kritikan guna penyempurnaan karya ini. Akhirnya semoga Allah SWT melindungi kita semua dan karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

**Makassar, Desember 2013**

**HIMAS PUSPITO PUTRA**

## **ABSTRAK**

**HIMAS PUSPITO PUTRA.** *Pemahaman Wartawan Media cetak Makassar terhadap Istilah Anarkisme : Studi Kasus Terhadap Penulis Berita Aksi*

*Penolakan Kenaikan BBM Mahasiswa Makassar (Dibimbing oleh Muliadi Mau, S.Sos, M.Si dan Drs Sudirman Karnay M.Si).*

Tujuan penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui pemaknaan terhadap penggunaan istilah “anarkisme” pada media cetak harian di Makassar khususnya yang berkaitan dengan pemberitaan. b. Untuk mengetahui ideologi dominan yang hendak ditampilkan dalam penggunaan istilah “anarkisme” dalam pemberitaan di media yang ada di kota Makassar. metode penelitian studi kasus.

Penelitian ini mencoba menelaah pemahaman wartawan Makassar terhadap penggunaan istilah anarkis dan anarkisme yang kerap digunakan dalam mendeskripsikan aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Dalam menulis dengan menggunakan istilah tertentu wartawan tidak bisa dilepaskan dari perangkat pengetahuannya terhadap hal tersebut. Apakah dalam hal penggunaan istilah anarkis dan anarkisme terdapat tendensi ideologis atau tidak. Mengingat anarkisme merupakan paham politik yang paling banyak disalahpahami oleh awam hingga akademisi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penggunaan istilah anarkis dan anarkisme oleh wartawan Makassar tidak lebih dari ketidaktahuan dan bukan merupakan tendensi ideologis. Wartawan Makassar sepenuhnya memahami istilah anarkis dan anarkisme sebagai kerusuhan dan bentrokan. Penggunaan kedua istilah tersebut merujuk pada situasi spontan dan tidak terkontrol dari mahasiswa yang melakukan demonstrasi, utamanya jelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak Juni 2013 lalu.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Definisi Operasional .....	19
F. Metode Penelitian .....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	26
A. Beberapa Teori Tentang Falsafah Pers.....	26
B. Media dan Konstruksi Realitas .....	30
C. Media dan Propaganda .....	38
C. Konstruksionisme dan Nilai Kerja Wartawan Terhadap Berita ...	41
E. Ideologi Media .....	45
F. Proses Kerja dan Kebijakan Media Massa .....	52
G. Nilai Berita dan Sudut Pandang Wartawan .....	54
F. Anarkisme Sebagai Sebuah Teori Sosial .....	56
BAB II GAMBARAN LOKASI PENELITIAN .....	63
A. Media Massa Cetak dan Perkembangannya .....	63
B. Wartawan dan Media Cetak di Makassar .....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	77
A. Hasil Pengamatan dan Wawancara.....	82
B. Ihwal Profesi Kewartawanan Dan Kaidah Serta Fungsi Jurnalistik	108
C. Wartawan Makassar dan Pemahannya Mengenai Anarkisme.....	110
D. Anarkisme Dan Kekerasan/Kerusuhan.....	117
BAB V PENUTUP .....	133
A. Simpulan .....	134
B. Saran-Saran .....	134
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Apa yang anda pikirkan ketika orang menyebut kata Anarkisme? Banyak diantara kita tentunya akan segera merasa gelisah dan cemas, terbayang suatu kelompok manusia bringas yang siap menebarkan keonaran, kekacauan, kehancuran dan malapetaka. Secara intuitif setiap orang akan mengenali istilah anarkisme sebagai tindakan amoral dan tidak terkontrol dimana kekacauan menjadi efek nyata dari pemahaman tersebut. Tanpa perlu menelaah lebih jauh, Istilah anarki sendiri sudah terlanjur menimbulkan kemarahan dan terlanjur secara luas disimpulkan bahwa anarkisme adalah sebagai suatu paham yang menakutkan.

Penggunaan istilah anarkisme untuk mendeskripsikan kekacauan dan ketidakteraturan akan dengan sangat mudah kita temui lewat kanal-kanal pengetahuan modern. Salah satunya lewat media massa, baik cetak maupun elektronik. Di Indonesia utamanya, hampir semua bentuk kerusuhan akan dideskripsikan oleh media massa sebagai tindakan yang anarkistis. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, teman atau pun kerabat kita akan sangat mudah mengucapkan kata anarkis untuk menggambarkan tindakan yang tidak terkontrol dan melanggar norma baik sehari-hari. Contohnya, “Ces, Kalau ngambil makanan jangan anarkis”.

Singkatnya, dalam memandang anarkisme, setiap orang baik itu orang awam, aparat negara, hingga lingkup akademik telah memiliki kesepahaman yang sama bahwa anarkisme merupakan musuh manusia dan peradaban. Tanpa perlu menelaah lebih jauh, orang kebanyakan telah sepakat bahwa “Anarkisme” tidak lebih dari penyakit sosial yang bertentangan dengan segala norma sosial yang baik. Pahaman tentang anarkisme tersebut tidak lagi hanya ada dalam wilayah kognisi/pengetahuan saja tapi juga dalam setiap sikap dan perilaku orang-orang kebanyakan.

### **Mengenal Anarkisme**

Secara etimologi Anarkisme merupakan kata dasar anarki yang diakhiri dengan isme. KATA anarki adalah tiruan kata asing seperti anarchy (Inggris) dan anarchie (Belanda/Jerman/Prancis), yang juga cuma meniru kata Yunani anarchos/anarchia. Ini merupakan kata bentukan a (tidak/tanpa/nihil) yang disisipi n dengan archos/ archia (pemerintah/kekuasaan). Anarchos/anarchia = tanpa pemerintahan. Sedangkan Anarkis berarti orang yang mempercayai dan menganut anarki. Sedangkan isme sendiri berarti faham/ajaran/ideologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Anarkisme berarti ajaran (paham) yang menentang setiap kekuatan negara; teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan undang-undang.

Secara keseluruhan anarkisme merupakan suatu faham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan.

Salah seorang tokoh gerakan anarkis Peter Kropotkin mengatakan anarkisme adalah sebuah sistem sosialis tanpa pemerintahan. Ia dimulai di antara manusia, dan akan mempertahankan vitalitas dan kreativitasnya selama merupakan pergerakan dari manusia. Pemikir Anarkis lainnya semisal Alexander Berkman secara terang-terangan menolak jika anarkisme diidentikkan dengan kekerasan atau gerakan yang hanya memiliki efek destruktif dari keberadaannya. Dalam bukunya *“What is Communist Anarchist”* Alexander Berkman justru menolak label kekerasan yang ditempelkan kepada gerakan anarkisme.

*“Therefore I must tell you, first of all, what Anarchism is not. It is not bombs, disorder, or chaos. It is not robbery and murder. It is not a war of each against all. It is not a return to barbarism or to the wild state of man. Anarchism is the very opposite of all that. Anarchism means that you should be free; that no one should enslave you, boss you, rob you, or impose upon you.*

*It means that you should be free to do the things you want to do; and that you should not be compelled to do what you don't want to do. It means that you should have a chance to choose the kind of a life you want to live, and live it without anybody interfering. It means that the next fellow should have the same freedom as you, that every one should have the same rights and liberties. It means that all men are brothers, and that they should live like brothers, in peace and harmony.*

*That is to say, that there should be no war, no violence used by one set of men against another, no monopoly and no poverty, no oppression, no taking advantage of your fellow-man. In short, Anarchism means a condition or society where all men and women are free, and where all enjoy equally the benefits of an ordered and sensible life”* (Berkman, 1929: 3).

“Pertama-tama yang ingin saya katakan kepada anda adalah apa-apa saja yang tidak termasuk anarkisme. Anarkis bukan bom, ketidakteraturan, apalagi kekacauan. Ia juga bukan perampokan atau pun pembunuhan. Juga bukan perang dari sebagian orang melawan yang lainnya. Apalagi untuk kembali ke barbarianisme atau tata masyarakat yang liar. Anarkisme sangat bertentangan dengan kesemua itu. Anarkis berarti anda harus bebas, tidak ada yang memperbudak, memerintah, merampok dan menindas anda. Anarkis berarti anda harus bebas untuk melakukan apa pun yang ingin anda lakukan dan tidak melakukan apa yang terpaksa anda

harus lakukan. Hal tersebut berarti anda memiliki kesempatan untuk memilih cara hidup yang ingin anda jalani dan tanpa satu orang pun yang mencampuri. Ini berarti orang lain disekitar anda juga punya kemerdekaan yang sama dengan anda. Dan semua orang punya hak yang sama dan bebas. Ini juga berarti setiap orang adalah bersaudara dan sudah selayaknya hidup seperti saudara dalam kedamaian dan keselarasan.

Hanya itu, tidak boleh ada perang, atau pun kekerasan yang digunakan oleh seseorang kepada yang lainnya, tidak ada monopoli dan kemiskinan. Tidak ada yang mengambil keuntungan dari sesama manusia. Singkatnya, Anarkisme berarti kondisi atau masyarakat dimana setiap laki-laki dan perempuan menjadi bebas, dimana semuanya menikmati keuntungan yang setara dari hidup yang penuh rasa dan keteraturan” (Berkman, 1929: 3).

### **Anarkisme Dalam Media Massa Makassar**

Media Massa sebagai kanal pengetahuan masyarakat merupakan alat yang ampuh dalam membentuk kesadaran masyarakat akan pengetahuan tertentu. Media massa dengan segenap perangkatnya juga memiliki kepentingan dan ideologi sendiri. Gramsci (dalam Fiske, 2010: 243) menginterpretasi media massa sebagai instrumen untuk meyebarkan dan memperkuat hegemoni dominan, akan tetapi media sekaligus dapat juga digunakan untuk menyebarkan dan memperkuat ide-ide dan gerakan counter hegemoni.

Berikut adalah penggalan berita dari Koran fajar yang ditulis pada Kamis, 22 Maret 2012 mengenai aksi mahasiswa Makassar dalam Demonstrasi menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak

*“Bentrokan pun pecah. Petugas kepolisian dibantu masyarakat yang kesal dengan aksi **anarkis** itu balik menyerang mahasiswa. Aksi saling lempar batu ini membuat ruas jalan Perintis Kemerdekaan macet total. Bentrokan baru mereda sekitar pukul 17.00 Wita. Itu setelah pembantu rektor III Unhas, Nasaruddin Salam, berhasil menenangkan mahasiswa dan meminta masuk ke dalam kampus.*

*Berselang setengah jam, seorang oknum mahasiswa Fakultas Pertanian, Nurhadi, yang diduga terlibat dalam bentrokan langsung diamankan petugas dan dinaikkan ke mobil Sabhara Polrestabes Makassar. Hingga pukul 17.45 Wita, mahasiswa tersebut masih diamankan. Juga, ikut diamankan sepeda motor Suzuki Smash berwarna biru. Petugas kepolisian terlihat masih berjaga-jaga di SPBU”.*

Contoh berita lain dapat ditemukan pada harian seputar Indonesia yang ditulis Kamis, 29 Maret 2012.

*“Selain di Kota Daeng, bentrokan antara mahasiswa dan aparat juga terjadi di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, Malang, dan Bangkalan, yang mengakibatkan puluhan mahasiswa terluka. Aksi mahasiswa yang diwarnai **anarkisme** memicu keprihatinan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia mengimbau segenap mahasiswa dan semua lapisan masyarakat untuk menjaga diri agar tidak melakukan demonstrasi yang berujung pada tindakan **anarkistis**. Khusus untuk mahasiswa Makassar, mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini juga mengajak mereka menjaga Kota Makassar agar tidak dikenal sebagai daerah yang **anarkistis**. “Janganlah Makassar ini dikenal sebagai daerah **anarkis( tis)**. Nanti ekonomi tidak jalan, nanti mahasiswa saat sudah sarjana mau kerja di mana.”*

Lantas, apa yang salah dari pemahaman tersebut? Apa dan Bagaimana pemaknaan yang benar mengenai anarkisme? Sejak kapan anarkisme dilekatkan dengan aksi-aksi kekerasan yang tidak terkontrol, sporadis, dan tidak memiliki tujuan? Apakah penggunaan istilah Anarkisme dalam Media Massa untuk menggambarkan aksi-aksi kerusuhan tidak lebih dari upaya pereduksian makna untuk kepentingan ideologi tertentu?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang ingin penulis layangkan kembali untuk kemudian bisa dikaji bersama agar dapat menghasilkan pemahaman yang jernih dan tidak dangkal mengenai apa dan bagaimana sebenarnya anarkisme itu. Bukan dalam rangka memprotagonisasi anarkisme tapi

lebih pada menelaah lebih dalam akar persoalan dan wacana yang bermain dalam pereduksian makna anarkisme itu sendiri.

Berpijak dari uraian di atas peneliti tertarik mendalami dan menelaah lebih jauh Apakah penggunaan istilah anarkisme dalam menggambarkan aksi-aksi kekerasan memiliki kepentingan ideologis atau kah hanya karena ketidak tahuan tentang apa makna sebenarnya dari anarkisme itu sendiri.

Dalam rangka mendalami proses produksi teks tersebut, peneliti memilih metode Studi Kasus terhadap pemberitaan tentang aksi Mahasiswa Makassar dalam menolak kenaikan BBM Juni 2013. Penulis hendak melakukan wawancara mendalam terhadap jurnalis yang memproduksi teks anarkisme dalam mendeskripsikan aksi yang berujung bentrok dan segala macam bentuk kekerasan lainnya.

Peneliti menuangkan kegiatan penelitian ini dalam bentuk skripsi tertulis sebagai pertanggungjawaban intelektual atas apa yang berusaha peneliti ungkapkan. Ada pun skripsi tersebut berjudul: **“Pemahaman Wartawan Media cetak Makassar terhadap Istilah Anarkisme : Studi Kasus Terhadap Penulis Berita Aksi Penolakan Kenaikan BBM Mahasiswa Makassar”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman wartawan Makassar terhadap istilah anarkisme

terkait dengan pemberitaan tentang aksi Mahasiswa Makassar dalam menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ?

2. Apa yang menjadi alasan wartawan media cetak Makassar menggunakan istilah anarkisme dalam mendeskripsikan aksi yang berujung bentrok dan kerusuhan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemaknaan terhadap penggunaan istilah “anarkisme” pada media cetak harian di Makassar khususnya yang berkaitan dengan pemberitaan.
- b. Untuk mengetahui ideologi dominan yang hendak ditampilkan dalam penggunaan istilah “anarkisme” dalam pemberitaan di media yang ada di kota Makassar.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

Kegunaan Teoritis: penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu komunikasi, khususnya bagi pengembangan penelitian yang berbasis kualitatif. Disamping itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi

referensi bagi kajian dinamika pers Indonesia sebagai salah satu kajian ilmu komunikasi

Kegunaan Praktis: penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tingkat pemahaman wartawan Makassar terhadap penggunaan istilah anarkis dan anarkisme dalam penyusunan teks-teks pemberitaan yang berkaitan dengan aksi mahasiswa makassar. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat meraih gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Hasanuddin.

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### **Teori Positif Anarkisme**

Ide-ide anarkis bisa ditemui dalam setiap periode sejarah, walaupun masih banyak penelitian yang harus dilakukan dalam bidang ini. Kita menemuinya dalam karya filsuf Tiongkok, Lao-Tse (yang berjudul, Arah dan Jalan yang Benar) dan juga filsuf-filsuf Yunani seperti ‘Hedonists’ dan ‘Cynics’ dan orang-orang yang mendukung ‘hukum alam’, khususnya Zeno yang menemukan aliran ‘Stoic’ yang berlawanan dengan Plato. Mereka menemukan ekspresi dari ajaran-ajaran Gnostics, Karpocrates di Alexandria dan juga dipengaruhi oleh beberapa aliran Kristen di Zaman Pertengahan di Prancis, Jerman dan Belanda. Hampir semua dari mereka menjadi korban represi. Dalam sejarah reformasi Bohemia, anarkisme ditemui dalam karya Peter Chelciky (The Net of Faith) yang mengadili negara dan gereja seperti yang dilakukan oleh Leo Tolstoy di kemudian hari (anarchopedia.org).

Anarkisme adalah gerakan sosial, ekonomi dan politik yang sebagian besar lebih tua ketimbang gerakan radikal kiri lain yang ada saat ini seperti Marxisme contohnya. Terdapat banyak aliran di dalam pemikiran Anarkis. Sebagian besar, memiliki perbedaan di tingkatan bagaimana sebuah masyarakat Anarkis secara rinci dikelola atau khususnya bagaimana sebuah masyarakat Anarkis dapat dicapai. Meski berbeda, semua cabang Anarkisme berbagi komitmen bersama untuk mengusung empat prinsip dasar, kebebasan individu, kesetaraan sosial-ekonomi, kebebasan berasosiasi, dan saling memberi manfaat (yakni kerjasama dan solidaritas) . Semua anarkis yang terutama sekali berupaya menciptakan sebuah masyarakat tanpa kelas, tanpa Negara, bebas dari penindasan dan eksploitasi, yang diorganisir serta dijalankan bersama, dengan empat prinsip tadi.

Segala bentuk pandangan dunia (world of view) yang dianut oleh para penganutnya juga meniscayakan konsekuensi metodologis dalam pencapaian cita-cita yang diusung. Begitu pula dengan anarkisme dengan cita-citanya untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas yang bebas dari penindasan baik oleh para pengambil kebijakan mau pun oleh mereka yang berada dibalik pengambilan kebijakan (para cukong dan sebagainya). Kaum anarkis menganggap keberadaan Negara dan kapitalisme jelas akan mengganggu pencapaian cita-cita masyarakat tanpa kelas. Oleh karenanya pelenyapan kekuasaan Negara dan modal merupakan suatu keniscayaan.

Anarkisme adalah teori politik yang bertujuan menciptakan anarki,” ketiadaan tuan, tanpa raja yang berkuasa.” (Proudhon, 1995: 264) Dalam kata lain, anarkisme adalah teori politik yang bertujuan untuk menciptakan suatu

masyarakat yang di dalamnya individu bebas berkumpul bersama secara sederajat. Anarkisme macam itu melawan semua bentuk kontrol hierarkis-baik kontrol oleh negara maupun kapitalis- karena merugikan individu dan individualitas mereka.

Dalam pernyataan seorang anarkis L. Susan Brown:

Meski pemahaman umum mengenai anarkisme adalah suatu gerakan anti negara kekerasan dengan kekerasan, anarkisme adalah suatu tradisi yang bernuansa lebih dalam daripada sekedar perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah. Kaum anarkis menentang pemikiran bahwa masyarakat memerlukan kekuasaan dan dominasi, dan malah membela bentuk-bentuk organisasi sosial, politik, dan ekonomi yang anti hierarki dan lebih kooperatif. (Brown ,1993: 106)

Namun demikian tidak diragukan lagi, anarkisme dan anarki adalah gagasan yang paling banyak disalah mengerti dalam teori politik. Umumnya, kata-kata tersebut digunakan untuk mengartikan “chaos”, atau “tanpa tatanan,” dan akibatnya, kaum anarkis dianggap menginginkan kekacauan social serta kembali ke “hukum rimba”

Kesalahpahaman proses ini bukan tanpa sejarah. Contohnya, di negara yang dipimpin oleh satu orang (monarki) kata “republik” atau ‘demokrasi” digunakan dengan arti yang sama seperti “anarki”, untuk menunjukkan ketidak tertiban dan kebingungan. Mereka yang memiliki kepentingan tertentu dengan adanya status quo tak pelak lagi ingin menunjukkan bahwa pada prakteknya sistem yang berlawanan tak dapat bekerja, dan bahwa bentuk masyarakat yang baru hanya akan membawa kekacauan. Atau seperti yang ditunjukkan oleh Errico Malatesta:

“Sejak muncul pemikiran bahwa diperlukan adanya pemerintah dan bahwa tanpa pemerintah hanya ada ketidak tertiban dan kekacauan, maka menjadi wajar dan logis bahwa anarki, yang berarti ketiadaan pemerintah, terdengar seperti ketiadaan tata tertib” (Anarchy, hal. 12)

Kaum anarkis ingin mengubah pemikiran “yang berdasarkan akal sehat” mengenai “anarki” ini, sehingga orang akan melihat bahwa pemerintah dan hubungan-hubungan sosial hierarki lainnya bersifat merugikan dan tidak perlu.

“Ubah pendapat, yakinkan publik bahwa pemerintah tak hanya tidak diperlukan, namun memang benar-benar merugikan, dan kemudian kata anarki, yang hanya karena berarti ketiadaan pemerintah, maka bagi setiap orang akan berarti: tatanan alamiah, penyatuan kebutuhan manusia dan kepentingan semuanya, kebebasan sepenuhnya di dalam solidaritas seutuhnya.” (ibid., hal. 12-13)

### **Media Massa Sebagai Saluran Reproduksi Pengetahuan**

Stephen W. LittleJohn mengatakan dalam bukunya bahwa Komunikasi massa merupakan proses organisasi media menciptakan dan menyebarkan pesan-pesan pada masyarakat luas dan proses pesan tersebut dicari, digunakan, dipahami, dan dipengaruhi oleh audiens (LittleJohn, 2009: 412) . Salah satu model awal untuk menggambarkan pandangan ini adalah model yang digunakan oleh Harold D Lasswell. Dalam artikel klasik tahun 1948 ini, Lasswell menghadirkan komunikasi yang sederhana dan sering digunakan :

Siapa

Mengatakan apa

Di saluran mana

Untuk siapa dan pengaruh apa

Dengan menggunakan model ini, Lasswell menyusun bagian-bagian sistem komunikasi massa. Ia mampu mengidentifikasi fungsi-fungsi utama media komunikasi, termasuk pengamatan (*surveillance*), memberikan informasi tentang lingkungan ; dan sosialisasi serta pendidikan yang dikenal dengan transmisi (*transmission*). Oleh sebab itu yang penting bagi komunikasi massa adalah media itu sendiri. Organisasi media menyebarkan pesan yang memengaruhi dan menggambarkan dunia masyarakat, dan media memberi informasi kepada media yang heterogen, menjadikan media sebagai bagian dari kekuatan institusi masyarakat (Littlejohn & Foss, 2009 ; 407)

Berbagai metafora telah diciptakan untuk mengartikan aspek-aspek media. Sebagai contoh, Denis McQuail mengacu pada delapan metafora : media merupakan jendela (*windows*) yang memungkinkan kita untuk melihat lingkungan kita lebih jauh, penafsir (*interpreters*) yang membantu kita memahami pengalaman, landasan (*platforms*) atau pembawa yang menyampaikan informasi, komunikasi interaktif (*interactive communication*) yang meliputi opini audiens, penanda (*signposts*) yang memberi kita instruksi dan petunjuk, penyaring (*filters*) yang membagi pengalaman dan fokus pada orang lain, cermin (*mirrors*) yang merefleksikan diri kita, dan penghalang (*barriers*) yang menutupi kebenaran (McQuail, 2010: 52-53).

Menurut McQuail, objektivitas adalah bentuk tertentu dari praktik media yang meliputi sikap-sikap tertentu dalam tugas-tugas pengumpulan, pengolahan,

dan penyebaran informasi. Syarat utama dalam prinsip objektivitas adalah sikap tak terpengaruh (*detachment*) dan netralitas (*neutrality*) terhadap objek berita (McQuail, 2010: 172). Dengan demikian, objektivitas dapat dikatakan mengharamkan subjektivitas dan keterlibatan personal dalam setiap tugas peliputan berita.

Syarat lain yang menjadi perhatian prinsip objektivitas, lanjut McQuail, adalah keharusan untuk mengurangi keberpihakan dan bias. Jurnalis diharapkan berada di jalur tengah; tidak memilih berada di salah satu sisi yang berkonflik dalam pemberitaan. Objektivitas juga mematok kriteria-kriteria kebenaran tertentu yang harus dipenuhi wartawan, antara lain: akurasi, relevansi dan kelengkapan. Terakhir, objektivitas menuntut wartawan untuk menghilangkan motif-motif atau pengabdian tersembunyi kepada pihak-pihak lain. Prinsip-prinsip ini menurut McQuail, memiliki pertalian, setidaknya secara teori, dengan konsep komunikasi rasional "tak terdistorsi" milik Habermas (McQuail, 2010 :).

Dalam buku yang ditulis Bill Kovach mengenai Sembilan Elemen Jurnalisme, dijelaskan fungsi utama dari seorang jurnalis adalah untuk menyampaikan kebenaran (Kovach, Tom Rosentiels: 2001: 38) . Kebenaran di sini memang adalah suatu hal yang masih bias pengertiannya, definisinya masih berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Misalnya untuk kebenaran yang dibahas dalam bidang filsafat akan berbeda dengan kebenaran yang dibahas dalam bidang agama , science, atau yang lainnya. Dalam hal ini kebenaran secara fungsional yang tentunya sesuai dengan tugasnya seorang wartawan.

Persoalan kebenaran yang membingungkan itu bisa jadi dipicu oleh

adanya perbedaan ideologi. Masing-masing wartawan atau produsen teks berita memandang kebenaran dengan cara pandang yang masing-masing berbeda satu sama lain. Apa yang oleh Karl Marx disebut sebagai kesadaran palsu tersebut kemudian menjadi elemen utama dalam proses konstruksi berita.

Sobur (Sobur, 2001:29-30) menganggap bias berita terjadi karena media tidak berada di ruang vakum. Usaha untuk tetap objektif sebenarnya ada, namun media berada di tengah realitas sosial yang sarat berbagai kepentingan, konflik dan fakta yang kompleks dan beragam, sehingga objektivitas dalam masing-masing media menjadi berbeda-beda kadarnya. Pandangan ini bukan hanya menjadi milik ilmuwan bermazhab kritis, beberapa ilmuwan komunikasi positivistik semisal Bittner pun beranggapan bahwa media, melalui gatekeeper senantiasa dipengaruhi oleh berbagai variabel dalam keputusannya menyiarkan suatu berita.

### **Teori Falsafah Pers**

Dalam membicarakan falsafah pers, kita kemungkinan akan bertemu dengan yang biasa disebut sebagai Four Theories Of the Press (empat teori tentang pers) yang pernah ditulis oleh Siebert bersama Peterson dan Schramm. Dari buku tersebut kemudian muncul teori baru tentang tanggungjawab social dalam komunikasi massa. (Kusumaningrat,2007: 19). Four Theories Of the Press memaparkan pandangan normatif Siebert dan kawan-kawan mengenai bagaimana media massa berfungsi dalam berbagai tipe masyarakat. Asumsi pertama mereka bahwa “pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur social dan politik dimana dia beroperasi.”

Teori Pertama dalam *Four Theories Of the Press* yakni **Authoritarian Theory** (Teori Pers Otoriter), yang diakui sebagai teori pers yang paling tua, berasal dari abad ke-16. Teori ini berasal dari falsafah kenegaraan yang membela kekuasaan absolut. Penetapan terhadap sesuatu yang benar hanya dikuasai oleh segelintir orang “bijaksana” yang mampu menjadi pemimpin. Jadi pada dasarnya pendekatan dilakukan dari atas ke bawah (up to down). Pers harus mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah dan mengabdikan kepada Negara. Oleh karenanya diberlakukan aturan yang sangat ketat terhadap aktifitas kejournalistikan seperti pengawasan melalui paten-paten, izin-izin terbit, dan sensor. Salah satu hal yang penting untuk dicatat adalah Negara dalam sistem seperti ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada individu dalam skala nilai kehidupan sosial.

Teori Kedua yaitu *Libertarian Theory* yang lahir setelah kebebasan politik, agama dan ekonomi semakin bertumbuh bersamaan dengan tumbuhnya pencerahan dan tuntutan akan kebebasan pers. Dalam teori ini manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan tidak benar.

Teori berikutnya adalah *Social Responsibility Theory* (Teori Pers Bertanggung Jawab Sosial) dan *Soviet Communist Theory* (Teori Pers Komunis Soviet) dianggap sebagai modifikasi dari dua teori sebelumnya. Teori pers bertanggungjawab social yang ingin mengatasi kontradiksi antara kebebasan sosialnya diformulasikan secara jelas pada tahun 1949 dalam laporan “Commission on The Freedom Of The Press”. (Kusumaningrat , 2007: 19). Komisi ini kemudian mengajukan 5 prasyarat sebagai syarat bagi pers yang

bertanggungjawab kepada masyarakat, yaitu :

1. Media harus menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikannya makna.
2. Media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik.
3. Media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat.
4. Media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai dalam masyarakat.
5. Media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat.

### **Studi Kasus Sebagai Alat Bedah**

Dalam penelitian ini penulis hendak menjelaskan tentang bagaimana media massa menjalankan fungsi dan kerjanya sebagai bagian dari penerapan teori tanggung jawab social. Untuk menjawab itu penulis menggunakan model penelitian studi kasus untuk lebih mengetahui secara mendalam tentang tingkat pemahaman dari para jurnalis di Makassar tentang istilah anarkisme yang sering mereka gunakan dalam penulisan berita. Model studi kasus sendiri berfokus pada satu (atau beberapa) contoh dari fenomena tertentu dengan maksud untuk melakukan penelahaan mendalam tentang sebuah peristiwa, hubungan,

pengalaman ataupun proses yang terjadi dalam kasus tersebut. Lebih lanjut lagi, Denscombe memaparkan lima karakteristik studi kasus yang antara lain : (1) Menyorot satu peristiwa, (2) Penelaahan mendalam, (3) Fokus kepada hubungan antar aspek kasus dan proses, (4) Setting alamiah, dan (5) Penggunaan beberapa sumber serta metode (Denscombe, 2007: 52)

Sebagai satu metode yang digunakan untuk menelaah peristiwa secara mendalam, studi kasus memang haruslah menyorot satu peristiwa yang menjadi kajian utama. Karakteristik berikutnya adalah penelaahan mendalam. Ini merupakan ciri khas studi kasus secara umum. Pendalaman pemahaman penulis terhadap kasus merupakan instrumen kunci pada studi kasus. Berkaitan dengan karakteristik selanjutnya, penelaahan tersebut dapat dilakukan dengan mencoba memecah kasus kedalam beberapa aspek yang kemudian dicari kaitannya. Pemahaman penulis akan kronologis terjadinya kasus juga menentukan kedalaman studi yang dilakukan.

Studi kasus merupakan pendekatan dalam penulisan yang menelaah suatu kasus secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Definisi tersebut bermakna bahwa penulis studi kasus merupakan orang yang paham mengenai kasus yang sedang diteliti. Pemahaman mendalam mengenai kasus dapat diperoleh melalui berbagai sumber: media massa, individu yang terlibat dalam kasus ataupun lembaga / organisasi.

Pembelajaran melalui media massa dapat dilakukan dengan memantau pemberitaan mengenai isu kasus. Penulis dapat membaca surat kabar –kemudian mengkliping ataupun membuka situs internet berita. Dari pemantauan tersebut

penulis berupaya mempelajari kronologis terjadinya kasus serta berbagai aspek yang saling berkaitan.

Pemahaman mengenai kasus juga dapat diperoleh dengan berinteraksi secara intensif dengan orang-orang yang terlibat dalam suatu kasus. Apabila kasus tersebut melibatkan sebuah organisasi / lembaga, maka informasi mengenai kasus dapat diperoleh dengan mewawancarai karyawan.

Adapun jenis studi kasus yang digunakan oleh penulis adalah model deskriptif yang lebih ditekankan pada model Studi kasus instrumental. Jenis ini digunakan untuk meneliti suatu kasus tertentu agar tersaji sebuah perspektif tentang isu atau perbaikan suatu teori. Dalam hal ini, kasus tidak menjadi minat utama; kasus memainkan peranan suportif, yang memudahkan pemahaman kita tentang sesuatu yang lain. Dalam hal ini, kasus seringkali dicermati secara mendalam, konteksnya dikaji secara menyeluruh dan aktivitas kesehariannya diperinci. Suatu kasus bisa dipandang sebagai sebuah gambaran tipikal bagi kasus-kasus lain. Pemilihan sebuah kasus lebih disebabkan karena hasrat kita untuk meningkatkan pemahaman tentang minat yang lain.

Kasus pemberitaan tentang aksi Mahasiswa Makassar menolak kenaikan harga BBM menjadi entry point apakah jurnalis media cetak di Makassar punya pemahaman yang benar tentang istilah anarkisme yang kerap digunakan dalam menggambarkan aksi-aksi mahasiswa di Makassar.

## **E. Definisi Operasional**

1. Anarkisme : **Anarkisme** atau dieja **anarkhisme** yaitu suatu paham politik

yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhsurkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan.

2. **Media Cetak** : Media ini terdiri dari lembaran kertas dengan sejumlah kata, gambar, atau foto dengan tata warna dan halaman putih. Media cetak merupakan dokumen atas segala dikatakan orang lain dan rekaman peristiwa yang ditangkap oleh jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, dan sebagainya.
3. **Penulis Berita** : Orang yang melakukan kegiatan jurnalistik berupa mencari, mengolah dan menyebarkan berita melalui media massa..
4. **Aksi** : Kegiatan mengemukakan pendapat dimuka umum baik dalam rangka menyampaikan penolakan mau pun tuntutan kepada kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
5. **Mahasiswa Makassar** : Pembelajar di perguruan Tinggi di Makassar.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki beberapa karakteristik. Penelitian dilakukan dengan melihat konteks permasalahan secara utuh, dengan fokus penelitian pada film dan bangunan konstruksi dalam sebuah film. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain

merupakan alat pengumpul data utama. Artinya, peneliti sendiri secara langsung mengumpulkan informasi yang didapat dari subyek penelitian.

### **1. Waktu dan Objek Penelitian**

Waktu penelitian direncanakan berlangsung kurang lebih 2 bulan terhitung sejak bulan Juli 2013 hingga September 2013. Sementara objek penelitian adalah Wartawan Media cetak Makassar yang menulis tentang aksi mahasiswa Makassar menolak kenaikan harga BBM pada bulan Juni 2013.

### **2. Tipe penelitian**

Tipe penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian ini didasarkan pada berita media cetak di makassar mengenai Aksi Mahasiswa Makassar Menolak kenaikan harga BBM pada bulan Juni 2013. Periode tersebut dipilih peneliti sebab pada periode itulah marak aksi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di Makassar . Penggunaan model studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam apa yang dipahami wartawan makassar mengenai anarkisme.

Dalam penelitian kualitatif, data utama diperoleh dari peneliti sendiri yang secara langsung turun di lapangan untuk memperoleh data dari objek penelitian. Penelitian ini dilakukan secara intensif dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang bersangkutan.

### **3. Teknik Pemilihan Informan**

Penentuan informan berdasarkan representativitas informasi atau data. Asumsinya adalah bahwa subjek memiliki kompleksitas dan keunikan masing-

masing. Oleh karena itu penelitian ini menghindari generalisasi, tiap-tiap subjek mewakili dirinya sendiri.

Pemilihan informan lebih ditekankan pada alasan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk itu peneliti akan memilih informan sesuai dengan kriteria yang ditentukan sebagai berikut :

- a) Wartawan yang menulis perihal berita tentang aksi mahasiswa Makassar, dalam hal ini berita mengenai aksi mahasiswa masuk rubrik perkotaan yang ditulis oleh wartawan berita kriminal. Namun untuk mendukung kekuatan penelitian maka semua wartawan masuk ke dalam pengamatan atau observasi
- b) Wartawan berdasarkan jenis medianya, yaitu jurnalis media cetak. Penentuan jenis media ditujukan pada keragaman peserta dalam interaksi serta bagaimana pengaruhnya terhadap sudut pandang pemberitaan mereka masing-masing.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan peneliti berdasarkan kebutuhan analisis dan pengkajian. Pengumpulan data tersebut sudah dilakukan sejak penulis menentukan permasalahan yang sedang dikaji. Pengumpulan data disesuaikan dengan metode penelitian yang telah peneliti tentukan, yaitu:

1. Pengumpulan data Primer berupa teks–teks berita. Data berita diutamakan adalah berita-berita yang berkaitan dengan aksi mahasiswa Makassar yang menggunakan istilah anarkisme dalam mendeskripsikan aksi kekerasan.

Materi lain yang merupakan berita tapi dari sumber yang berbeda atau sumber informasi lain yang bukan merupakan berita seperti tajuk rencana, opini, karikatur, surat pembaca dan laporan survey yang relevan dengan penelitian, tetap akan dijadikan acuan tetapi sifatnya sekunder. Teknik Pengumpulan Data

2. Observasi yaitu pengamatan pada subjek penelitian untuk mendapatkan bukti data sehubungan dengan perilaku terbuka subjek penelitian.
3. Wawancara Mendalam (*indepth interview*)

Untuk itu metode yang tepat bagi penulis adalah metode wawancara. Menurut Pawito (2007:132-136) wawancara adalah alat pengumpulan data yang penting untuk penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek (aktor). Selain untuk mengetahui perspektif subjek terhadap fenomena, wawancara di sini untuk mengetahui penilaian atau pandangan subjek terhadap perilaku mereka sendiri (*actor's accounts of their behaviour*).

Dalam penelitian kualitatif terdapat 3 (tiga) bentuk wawancara (dalam Pawito:132) yaitu : *pertama*, wawancara percakapan informal (*the informal conversational interview*) yang tidak terstruktur, spontan dan luwes sesuai dengan perkembangan di lapangan. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mensistemasi dan mengorganisasikan data yang kompleks.

*Kedua*, wawancara mendalam menggunakan pedoman (*indepth interview*) untuk lebih fokus pada pokok penelitian. Dengan adanya

pedoman wawancara maka peneliti mudah mempersiapkan rancangan data dari awal hingga akhir penelitian, tapi tidak menutup kemungkinan mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Dan *ketiga*, wawancara dengan menggunakan *open-ended standart* yang membutuhkan tingkat kecermatan tinggi dalam menyusun pertanyaan yang terdiri dari item dan bagian-bagian yang terkait termasuk penyusunan kalimat maupun kata-kata pertanyaan. Jenis wawancara ini lebih untuk memastikan pertanyaan yang sama kepada setiap subjek, juga cara dan standar yang dipakai.

Dalam penelitian ini bentuk wawancara utama yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan alasan bahwa peneliti perlu memfokuskan permasalahan sesuai dengan rumusan masalah, dalam hal ini pedoman wawancara akan sangat membantu. Adapun wawancara informal dilakukan hanya untuk mengetahui gambaran latar penelitian.

4. Penelitian Pustaka (*Library research*) dengan mempelajari dan mengkaji literatur yang berhubungan dengan permasalahan untuk mendukung asumsi sebagai landasan teori permasalahan yang dibahas. Data dari kajian pustaka digunakan sebagai data sekunder.

## **5. Teknik Analisis Data**

Adapun jenis studi kasus yang digunakan oleh penulis adalah model deskriptif yang lebih ditekankan pada model Studi kasus instrumental. Jenis ini digunakan untuk meneliti suatu kasus tertentu agar tersaji sebuah perspektif tentang isu atau perbaikan suatu teori. Dalam hal ini, kasus tidak menjadi minat utama; kasus memainkan peranan suportif, yang memudahkan pemahaman kita tentang sesuatu yang lain.

Kasus seringkali dicermati secara mendalam, konteksnya dikaji secara menyeluruh dan aktivitas kesehariannya diperinci. Suatu kasus bisa dipandang sebagai sebuah gambaran tipikal bagi kasus-kasus lain. Pemilihan sebuah kasus lebih disebabkan karena hasrat kita untuk meningkatkan pemahaman tentang minat yang lain. Penelitian dengan pendekatan Studi kasus lebih banyak berfokus pada atau berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan *how* (bagaimana) dan *Why* (kenapa), dan pada tingkatan tertentu juga menjawab pertanyaan *what* (apa/apakah), dalam kegiatan penelitian.

Seperti halnya pada tujuan penelitian lainnya pada umumnya, pada dasarnya peneliti yang menggunakan metoda penelitian studi kasus bertujuan untuk memahami obyek yang ditelitinya. Meskipun demikian, berbeda dengan penelitian yang lain, penelitian studi kasus bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami obyek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu 'kasus'. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak sekedar untuk menjelaskan seperti apa obyek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Dengan kata lain, penelitian studi kasus bukan sekedar menjawab pertanyaan

penelitian tentang 'apa' (what) obyek yang diteliti, tetapi lebih menyeluruh dan komprehensif lagi adalah tentang 'bagaimana' (how) dan 'mengapa' (why) obyek tersebut terjadi dan terbentuk sebagai dan dapat dipandang sebagai suatu kasus. Sementara itu, strategi atau metoda penelitian lain cenderung menjawab pertanyaan siapa (who), apa (what), dimana (where), berapa (how many) dan seberapa besar (how much).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Beberapa Teori Tentang Pers**

##### 1. Pers, Masyarakat dan Negara

Untuk melihat kolerasi antara tiga elemen ini, penulis merujuk pada beberapa teori modern yang menjelaskan hubungan negara dan masyarakat. Untuk itu ada tiga teori tentang Negara dan masyarakat yang paling sering dikemukakan para ahli yang relevan untuk kepentingan studi ini. Ketiga teori itu adalah: Teori pluralis, teori organis, dan teori Marxis.

**Teori pluralis**, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana proses system politik berlangsung (Bulkin dalam Abrar, 1995:30). Teori ini menempatkan entitas Negara hanya sebagai salah satu bagian dari banyak kelompok politik yang “bermain” dalam sisitem politik secara keseluruhan. Di dalam masyarakat banyak aktor politik yang bermain, seperti partai politk, kelompok kepentingan dan sebagainya, atau dengan kata lain, terdapat pluralisasi kekuatan kekutan sosial politik sehinga hampir tidak mungkin ada satu kekuatan yang dominan. Di sini Negara menjadi aktor politik tanpa peran strategis kecuali hanya menjadi semacam wasit atau mediator dari dari berbagai aktor politik masyarakat yang sedang bermain.

Dalam konteks inilah negara, menurut para penganut pluralis, menjadi tidak penting untuk diteliti, oleh karena peranan negara tidak menentukan dalam

suatu proses sistem politik. Kesimpulannya teori pluralis melihat hubungan Negara dan masyarakat dalam posisi yang timpang atau tidak seimbang dimana masyarakat menduduki posisi yang dominan sedangkan Negara menduduki subordinat.

- **Teori organis**, mengatakan, Negara harus berperan aktif dan berinisiatif sendiri dalam menentukan keputusan politik untuk pembangunan. (Abrar, 1995:31)

Oleh karena itu, otonomisasi dan bahkan kemahakuasaan Negara dianggap sangat perlu. Apalagi Negara harus berhadapan dengan kelompok sosial politik masyarakat yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Dalam konteks ini seperti kata Arif Budiman, semboyan dari dan oleh rakyat tidak berlaku dalam teori ini. Yang ada hanyalah Negara untuk rakyat. Dari sinilah kita lihat betapa pemikiran Hegel baik langsung atau pun tidak langsung telah mempengaruhi teori organis ini .

Kesimpulannya dalam teori ini Negara menduduki posisi dominan dan masyarakat menduduki posisi subordinan, atau kebalikan dari teori pluralis. Perlu pula dikemukakan, menurut Abrar untuk menghindari kecenderungan tidak demokratis atau munculnya Negara otoriter maka teori ini kemudian dimodifikasi menjadi teori korporatisme, bahawa dalam teori ini Negara sebenarnya memerlukan peran serta dari berbagai kelompok masyarakat dalam rangka efektifitas dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, selain juga untuk kepentingan legitimasi politik.

**Teori Marxis:** Teori ini sejak dari akar klasiknya hingga kini, tidak menunjukkan perubahan yang fundamental. Kalau dulu Marx mengatakan, Negara hanya menjadi pelayan atau alat para kapitalis, maka dalam teori modernnya lebih dikembangkan lagi, bahwa Negara dalam kondisi tertentu punya otonomi relatif. Otonomi ini berlaku ketika negara berhadapan dengan kelas dominan untuk tujuan jangka pendek, yaitu untuk mempertahankan sistem kapitalisme sebagai suatu keseluruhan dalam keadaan tertentu.

Misalnya dalam krisis ekonomi Negara boleh saja mengambil inisiatif yang bertentangan dengan kepentingan kelas kapitalis atau pribadi-pribadi pemilik modal untuk mempertahankan kepentingan jangka panjang, yaitu keutuhan dan konservasi sistem kapitalisme. Dalam praktiknya Negara mungkin akan membuat regulasi yang merugikan para kapitalis lokal, akan tetapi, regulasi ini justru bermanfaat menstabilkan pasar internasional.

Dalam “Otonomi relatif” Negara memiliki keterbatasan struktural jika berhadapan dengan sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, Negara menurut teori ini, merupakan sub-ordinasi, atau lebih tepatnya, instrumen dari sistem kapitalisme.

Berdasarkan gambaran tiga perspektif hubungan Negara dan masyarakat maka posisi pers akan ditempatkan dalam studi ini. Ada dua catatan yang perlu peneliti kemukakan sebagai konsekuensi dari penempatan pers dalam konteks hubungan Negara dan masyarakat.

*Pertama*, pers bisa dilihat sebagai mediasi dari berbagai kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang berinteraksi. *Kedua*, pers bisa juga dilihat sebagai salah satu bagaian kekuatan sosial, ekonomi, dan poltik yang berinteraksi dalam suatu orde politik tertentu. Dalam konteksnya hubunganya dengan Negara dan masyarakat, pers selalu menempatkan drinya sebagai salah satu kekuatan sosio politik masyarakat non Negara. Hal ini lebih merupakan konsekuensi sosiologis , ideologis, dan historis dari eksisitensi pers itu sendiri. (Subagio dalam Abrar, 1995:37)

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa apabila Negara menempati posisi dominasi, berarti masyarakat menempati posisi sub-ordinat. Maka pers, cenderung lebih berorientasi ke Negara. Seperti yang dilakoni Jakob Oetama ketika menjadi Pimpinan redaksi Kompas. Menurutnya, agar tetap bertahan dalam kuasa Orde baru, para penerbit dan Pimpian redaksi terpaksa menerima paham kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat (2001:38). Meski demikian, kalangan jurnalis tentu saja menolak intervensi pemerintah. Mereka mengatakan, kontrol ketat pemerintah atas pers telah melumpuhkan pers dan membuatnya “impoten” dalam menyalurkan informasi politik. (Hanazaki, 1998:48).

Sebaliknya, apabila masyarakat menempati posisi dominan dan Negara pada posisi sub-ordinat ,maka pers, lebih berpihak pada masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Denis McQuail. Dalam model dominatifnya Mcquail (1989:159) mengatakan distribusi kekuasaan memusat ke Negara atau elit ekonomi yang berkuasa dan biasanya media hanya dimiliki oleh mereka yang mempunyai akses

politik pada sumber kekuasaan. Hal ini membawa implikasi pada orientasi media dalam warna ideologisnya.

Apabila kedudukan politik Negara dominan maka pers beserta kekuatan politik non negara menjadi sub-ordinat/lemah dalam pembentukan kebijakan politik. Sebaliknya bila kedudukan politik masyarakat, termasuk pers, kuat, maka Negara menjadi sub-ordinat /lemah.

Fakta ini bila dihubungkan dengan kondisi di mana Indonesia pernah mendikotomikan peran negara dan masyarakat saat orde baru yaitu, terpisahnya negara dan masyarakat dalam proses pertumbuhan dan artikulasinya dengan menguatnya peran militer dan kapilisme internasional dalam membina Negara itu sendiri, maka sifat dan watak kekuasaan Orde baru dapat dikatakan berciri: otonom, dominasi dan represif jika berhadapan dengan elemen masyarakat. (Masoed 1990: 41).

### **B. Media dan Konstruksi Realitas**

Peter L. Berger dan dan Thomas Luckman (dalam Sobur, 2001:91) menyatakan bahwa, realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi subjektif dan objektif. Berger dan Luckman memisahkan antara kenyataan dan pengetahuan. Menurut mereka realitas adalah kualitas yang terdapat dalam realitas-realitas, yang memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa realitas itu pasti dan memiliki karakteristik secara spesifik.

Dalam hal ini, pemahaman “realitas” dan “pengetahuan” dipisahkan. Mereka mengakui realitas objektif dengan membatasi realitas sebagai kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada diluar kemauan kita sebab fenomena tersebut tidak bisa ditiadakan. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa fenomena adalah riil adanya dan memiliki karakteristik yang khusus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kenyataannya realitas sosial tidak berdiri sendiri tanpa kehadiran seseorang baik di dalam maupun di luar realitas tersebut. Realitas memiliki makna ketika realitas sosial tersebut dikonstruksi dan dimaknakan secara subjektif oleh orang lain sehingga memantapkan realitas tersebut secara objektif.

Dalam pemahaman konstruksi Berger, dalam memahami realitas/peristiwa atau proses dialektis tersebut terjadi dalam tiga tahap, Berger menyebutnya sebagai momen. *Pertama*, **tahap eksternalisasi** yaitu usaha pencurahan diri manusia ke dalam dunia baik mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar manusia. Manusia akan selalu mencurahkan dirinya ketempat dimana dia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia, dengan kata lain bahwa manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia. *Kedua*, **tahap objektivasi**, yaitu hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi. Hasil tersebut menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si manusia tersebut sebagai suatu aktivitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. *Ketiga*, **tahap internalisasi**, sebagai proses penyerapan kembali dunia objektif

kedalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektifitas individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui proses internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat. Ketiga proses tersebut saling berdialektika secara terus menerus pada diri individu dalam rangka pemahaman tentang realitas. Eriyanto ( 2001: 14-15).

Sementara itu Menurut Pilliang (2002:210), dalam perbincangan mengenai media dan realitas, ada relasi yang tidak dapat dipisahkan antara 'realitas' yang direpresentasikan di dalam media, 'bahasa' dan system 'pertandaan' (*signification*) yang digunakan di dalamnya, serta 'ideologi' yang beroperasi dibaliknya. Media sering dikatakan sebagai 'cermin realitas' (*mirror of reality*), yaitu merupakan 'representasi obyektif' dari realitas, atau *icon* dari realitas. Akan tetapi, dalam banyak kasus, ketimbang merupakan refleksi dari realitas, media justru memalsukan realitas, menopengi realitas, membungkus realitas atau bahkan sama sekali tidak ada relasinya dengan realitas. Media lebih menjadi 'cermin kepentingan' dibanding menjadi 'cermin realitas', yang di dalamnya realitas diinterpretasikan berdasarkan struktur kepentingan dibalik media itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa realitas itu bersifat subjektif, realitas itu hadir karena diciptakan oleh sang pembuat berita. Dalam hal ini realitas tercipta lewat konstruksi, dari sudut pandang setiap wartawan. Semua tergantung dari bagaimana konsepsi ketika realitas dipahami oleh wartawan dalam pandangannya sendiri. Selain itu kepentingan dibalik media juga turut mempengaruhi konstruksi

realitas. Ada dua kepentingan utama media yaitu, kepentingan ekonomi (*economic interest*) dan kepentingan kekuasaan (*power interest*), yang mengendalikan isi media, informasi yang disajikan, dan makna yang ditawarkannya. Akibatnya, ada kepentingan dasar yang justru terabaikan yaitu kepentingan publik. Media yang seharusnya menjadi ‘ruang publik’ justru mengorbankan kepentingan publik disebabkan kepentingan-kepentingan utama media tersebut.

Substansi teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Berger dan Luckmann adalah pada proses simultan yang terjadi secara alamiah melalui bahasa dalam kehidupan sehari-hari pada sebuah komunitas primer dan semi-sekunder. Basis sosial teori dan pendekatan ini adalah masyarakat transisi-modern di Amerika pada sekitar tahun 1960-an, dimana media massa belum menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dibicarakan. Dengan demikian teori konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Luckmann tidak memasukkan media massa sebagai variabel atau fenomena yang berpengaruh dalam konstruksi sosial atas realitas.

Melalui Konstruksi Sosial Media Massa, Realitas dalam Masyarakat Kapitalistik, teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Luckmann telah direvisi dengan melihat variabel atau fenomena media massa menjadi sangat substansi dalam proses eksternalisasi, subjectivasi, dan internalisasi. Dengan demikian sifat-sifat dan kelebihan media massa telah memperbaiki kelemahan proses konstruksi sosial atas realitas yang berjalan lambat itu. Substansi teori konstruksi sosial media massa adalah pada sirkulasi

informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis.

Posisi konstruksi sosial media massa adalah mengoreksi kelemahan dan melengkapi konstruksi sosial atas realitas, dengan menempatkan seluruh kelebihan media massa dan efek media pada keunggulan konstruksi sosial media massa atas konstruksi sosial realitas. Dari konten konstruksi sosial media massa, proses kelahiran konstruksi sosial media massa melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. Tahap Menyiapkan Materi konstruksi

Masing-masing media memiliki desk yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan visi suatu media. Isu-isu penting setiap hari menjadi fokus media massa, terutama yang berhubungan dengan tiga hal yaitu harta, tahta, dan wanita.

b. Tahap Sebaran Konstruksi

Pilihan-pilihan wilayah sebaran adalah strategi lain dalam sebaran konstruksi media berdasarkan pada segmentasi. Pilihan-pilihan sumber informasi juga dapat dipilih berdasarkan pemetaan kekuasaan sosial informasi itu di masyarakat.

c. Pembentukan Konstruksi Realitas. Tahap ini terbagi atas dua yaitu tahap pembentukan konstruksi realitas dan pembentukan konstruksi citra.

d. Tahap Konfirmasi

Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun pembaca dan pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam pembentukan konstruksi.

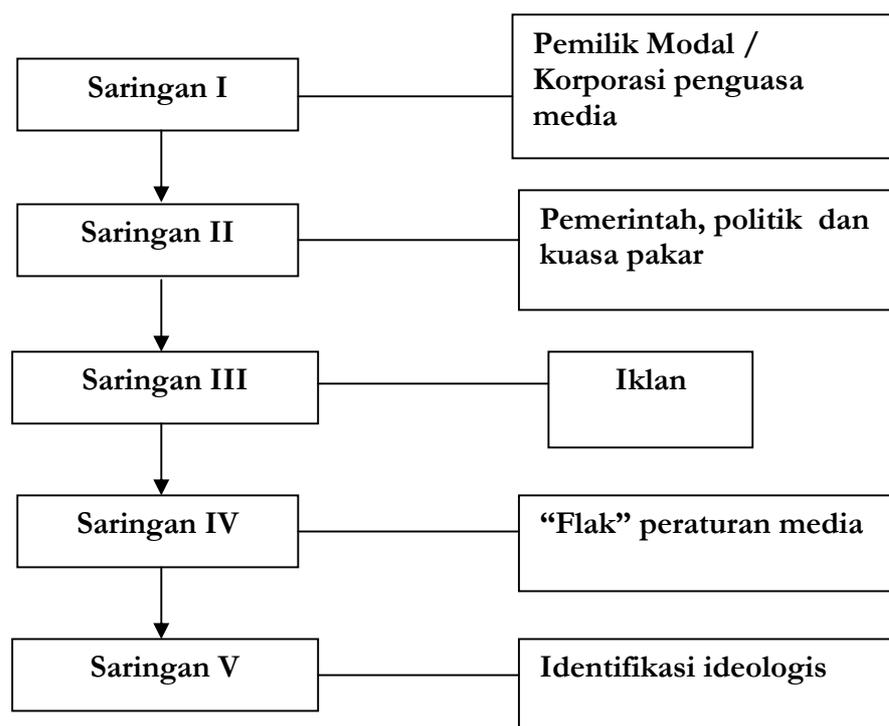
Setiap media massa pada dasarnya memiliki karakter dan latar belakang tersendiri, baik dalam isi dan pengemasan beritanya, maupun dalam tampilan serta tujuan dasarnya. Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbeda dari masing-masing media massa. Entah itu kepentingan politik, ekonomi, agama dan sebagainya. Media massa ada yang memiliki kepentingan politik, karena ia didanai dan disupport oleh kekuatan politik tertentu dengan tujuan penyampaian pesan politik tertentu oleh kekuatan tersebut. Selain itu, tak bisa dipungkiri Media massa juga mengemban motif ekonomi, dimana keuntungan secara materil adalah satu-satunya target dari media tersebut.

Adanya kepentingan dari media massa turut mempengaruhi berita yang disampaikan kepada khalayak. Dan dari sini kemudian hadir anggapan bahwa fakta yang disampaikan oleh media massa bukanlah merupakan fakta yang objektif, melainkan fakta yang telah dikonstruksi oleh media atau penulisnya/wartawan dengan latar belakang kepentingan tertentu. Adanya kepentingan dari media massa turut mempengaruhi berita yang disampaikan kepada khalayak. Dan dari sini maka munculah sebuah anggapan bahwa fakta yang disampaikan bukanlah fakta yang objektif, melainkan fakta yang telah dikonstruksi oleh media atau penulisnya/wartawan dengan latar belakang kepentingan tertentu. Dalam pandangan kaum konstruksionis, "berita yang kita baca pada dasarnya adalah hasil dari konstruksi kerja jurnalistik, bukan kaidah

baku jurnalistik. Semua proses kontruksi (mulai dari memilih fakta, sumber, pemakaian kata, gambar, sampai penyuntingan) memberi andil bagaimana realitas tersebut hadir dihadapan khalayak.” (Eriyanto, 2002 : 26).

Media massa sebagai bagian dari narasi besar peradaban telah menjelma menjadi kekuatan baru dari pola pertumbuhan masyarakat. Dalam bukunya yang berjudul “Necersary Illusions” seperti dikutip David Cogswell ( 2006:70), strategi propaganda media massa menurut Chomsky memiliki regulasi tersendiri dalam struktur hirarkis kuasa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan media massa.

Pada buku Manufacturing Consent, Chomsky dan Edward S. Herman menguraikan media dengan kekuatannya memiliki efek tak terduga dalam mengelola agenda setting pemberitaannya. Lebih lanjut Chomsky menjelaskan paradigma tersebut sebagai saringan berita ”News Filters “ (dalam Cogswell, 2006: 82) Ada lima saringan media menurut Chomsky ;



*Penjelasan New Filters Chomsky :*

1. Pada tahap pertama : pemilik modal sebagai penguasa media memiliki kuasa atas regulasi pemberitaan yang menyangkut dirinya. Media begitu sulit untuk melepaskan diri dari kuasa pemilik modal yang membuat kebutuhan akan uang hambatan yang begitu luar biasa bagi berlangsungnya pers bebas.

2. Pada tahap kedua : media begitu mengantungkan regulasi pemberitaanya pada faktor yang berhubungan dengan pemerintah dan politik. Pola ini membuat media begitu sulit melepaskan konstruksi pemberitaanya dari agenda-agenda politik pemerintahan.

3. Pada tahap ketiga : media begitu dipengaruhi oleh pengiklan yang sebahagian besar mengontrol pemberitaan media tanpa sadar. Iklan menjadi regulasi pengontrol baru dari kebebasan masyarakat dalam memperoleh pemberitaan media massa.

4. Pada tahap ke-empat : media menetapkan aturan tersendiri dalam mengelola kebijakan medianya. Aspek ini biasanya mengatur kode etik, norma dan nilai yang menjadi alat pendisiplinan pekerja media seperti wartawan dan sejumlah karyawan media lainnya yang bekerja dalam satu unit tim media.

5. Pada tahap kelima : media umum cenderung memiliki musuh ideologis yang menjadi konsesus masyarakat. Misalnya Anarkisme, komunisme dan berbagai hal lainnya yang menyangkut kesepakatan ideologis bersama dalam sebuah negara.

**C. Media dan Propaganda**

Bagi Noam Chomsky, ide Habermas tentang ruang publik yang tidak terganggu adalah sebuah ide yang sulit terwujud. Dalam buku berjudul: *“Manufacturing Consent; The Political Economy of the Mass Media”* (1996), Chomsky menguraikan model propaganda dan kekuatan tak terlihat yang menyusun sebuah media. Media menurutnya menyebarkan informasi yang bias karena media tanpa sadar akan terhegemoni. Media massa bagi Chomsky senantiasa akan terus memainkan peran propaganda, memobilisasi dukungan istimewa untuk kepentingan ideologi tertentu.

Chomsky kemudian menguraikan sebuah model propaganda media yang disebutnya sebagai jantung propaganda. Jantung ini, oleh Chomsky, dibagi menjadi lima saringan utama. Kelima bagian ini merupakan peneguhan dari berbagai faktor yang mempengaruhi konstruksi sebuah media. Bila paradigma konstruksivisme membahas media dan beragam alat komunikasi massa sebagai bagian dari konstruksi, maka Chomsky melihatnya sebagai sesuatu yang mempengaruhi media (1996:2).

Pada saringan *pertama*, adalah media menerima beragam pesan dari luar kemudian disaring oleh pemilik media. Representasi dari pemilik modal yang selalu menjaga relasi dari kepentingan pasar. Termasuk di antaranya media cetak dan elektronik selalu membangun relasi dengan pemilik modal agar medianya diuntungkan. Segala bentuk pemberitaan yang berkaitan langsung dengan pemilik modal selalu dijaga relasinya atau disaring sehingga tidak akan menyentuh atau mengganggu pemilik modal.

Saringan *kedua*, media selalu membangun korelasi dengan pengiklan. Sehingga pengiklan memiliki hak menyaring baragam informasi yang berkaitan dengan bisnis mereka. Dengan subsidi iklan, ongkos sebuah media menjadi begitu murah. Sehingga segala pesan yang muncul mesti menjaga kepentingan pengiklan.

Saringan *ketiga*, adalah ketergantungan unsur pemberitaanya pada pemerintah, pebisnis dan ”pakar”. Media dalam pandangan Chomsky telah menyusun sebuah agenda *setting* ketergantungan, segala otoritas pemberitaan mesti digantungkan pada tiga subyek di atas. Isi media disaring ketat oleh tiga agen kekuasaan tersebut. Bahkan tidak jarang dijadikan alat propaganda segala bentuk kebijakan yang menguntungkan penguasa dan pasar.

Pada saringan *keempat*. Chomsky menyebutnya *flak* yaitu tahap dimana media mendapatkan kekuatan pengontrol lewat beragam kebijakan baik berupa undang-undang yang digunakan pemerintah atau lewat sanksi hukum. Contoh yang kerap kali terjadi pada industri pers adalah dibuatkan undang-undang yang selalu menghambat kebebasan pers. Orde baru sangat ketat menertibkan media-media yang dianggap bermasalah lewat mekanisme SIUPP.

Pada saringan *kelima*, yakni menciptakan mitos musuh bersama. Chomsky mencontohkan ideologi komunisme dan gerakan terorisme sebagai lawan dan dianggap hantu Amerika. Sama halnya Indonesia di masa rejim Orde Baru yang kerap mencurigai aktivitas politik tertentu sebagai subversif. Hantu cap subversif

itu tetap bertahan dan mencekam benak rakyat Indonesia setelah bahkan sepuluh tahun kejatuhan Orde Baru (1996:2-4).

Jika analisis Chomsky benar adanya, bukan hal yang berlebihan ketika dikatakan bahwa para penggiat media tidak dapat secara leluasa untuk menuliskan peristiwa-peristiwa publik tanpa adanya suatu mekanisme kontrol dari penguasa. Dengan demikian fakta yang muncul di media tidak sepenuhnya sama dengan fakta yang sebenarnya. Mengingat fakta di media hanyalah hasil konstruksi dari olahan para awak di meja-meja redaksi. Dan sulit dikatakan bahwa apa yang tulis adalah sebuah realitas nyata di lapangan.

#### **D. Konstruksionisme dan Kerja Wartawan atas Berita**

Konsep konstruksionisme ini diperkenalkan oleh seorang sosiolog intepretatif, Peter L. Berger. Lalu bersama Thomas Luckman Ia banyak menulis karya dan menghasilkan tesis mengenai konstruksi sosial atas realitas (dalam Sobur, 2006: 91, lihat juga Eriyanto, 2002:13). Tesis utama Berger berkisar pada hakekat manusia dan masyarakat, dimana menurutnya masyarakat adalah produk dari manusia, namun masyarakat ini secara terus menerus mempunyai aksi kembali terhadap manusia (pembuatnya). Sehingga manusia pun adalah produk masyarakat. Dalam hal ini terjadi proses dialektis. Menurut Berger dan Luckman, realitas sosial dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Konstruksi sosial menurut mereka, tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-kepentingan.

Mengenai proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi, dalam bukunya Analisis Framing, Eriyanto (2002:14-15) menjabarkannya sebagai berikut :

*Pertama*, Eksternalisasi, yakni usaha untuk pencurahan atau ekspresi diri manusia kedalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, Ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana Ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai tertutup yang lepas dari dunia luarnya.

*Kedua*, Objektivasi, yakni hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi. Hasil itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu aktivitas yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya.

*Ketiga*, Internalisasi, yakni penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui proses internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat.

Lalu, seperti yang dikutip Eriyanto, Berger memandang bahwa realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman ini realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas itu dengan konstruksinya masing-masing.

Dalam kaitannya dengan media massa dan berita, kaum konstruksionis memandang bahwa realitas yang ada di media massa yakni berita adalah bukanlah realitas yang objektif, melainkan sebagai realitas yang telah dikonstruksi oleh pembuatnya, yakni wartawan/media itu sendiri. Hal ini berbeda dengan pandangan positivis yang memahami bahwa realitas yang ada di media itu bersifat objektif ( Eriyanto, 2005:19-36)

1. Fakta/peristiwa adalah hasil konstruksi. Bagi kaum konstruksionis, realitas itu bersifat subjektif. Realitas itu hadir, karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Disini tidak ada realitas yang objektif, karena realitas itu tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu. Realitas bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan yang berbeda.

2. Media adalah agen konstruksi. Kaum konstruksionis memandang media bukanlah saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Disini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas.

3. Berita bukan refleksi dari realitas. Ia hanya konstruksi dari realitas. Bagi Kaum konstruksionis berita itu ibaratnya seperti sebuah drama. Ia bukan menggambarkan realitas, tetapi merupakan potret dari arena pertarungan antara berbagai pihak yang berita dengan peristiwa.

4. Berita bersifat subjektif/Konstruksi atas realitas. Kaum konstruksionis memandang bahwa berita mempunyai sifat subjektif, hal ini dikarenakan berita

adalah hasil konstruksi realitas yang dilakukan oleh wartawan dengan menggunakan subjektivitasnya.

5. Wartawan bukan pelapor. Ia agen konstruksi realitas. Kaum konstruksionis menilai wartawan sebagai aktor/agen konstruksi, dimana pekerjaannya bukan sebatas melaporkan sebuah fakta, tapi juga turut mengkonstruksi fakta yang diduplikasinya untuk kemudian dijadikan berita.

6. Etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang integral dalam produksi berita. Kaum konstruksionis menilai bahwa aspek etika, moral, dan nilai-nilai tertentu tidak mungkin dihilangkan dari pemberitaan media. Sisi subjektifitas dan penilaian atas fakta membuat wartawan memiliki posisi untuk terlibat dalam penuangan unsur moral, etika juga keberpihakan ketika ia mengkonstruksi realitas.

7. Nilai, Etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang integral dalam penelitian. Kaum konstruksionis memandang bahwa peneliti bukanlah subjek yang bebas nilai, karena itulah etika dan moral serta keberpihakan peneliti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penelitian.

8. Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita. Kaum konstruksionis memandang bahwa khalayak bukanlah subjek yang pasif, melainkan subjek yang aktif dalam menafsirkan apa yang dibaca, ditonton ataupun didengar.

Pada intinya konstruksionisme menyatakan bahwa realitas adalah hasil konstruksi, dan pada akhirnya realitas yang ada di dunia ini tidaklah bersifat

objektif, semuanya memiliki subjektifitas dari yang membuat maupun yang menerima realitas itu, perspektif atau cara pandang dalam realitas juga mempengaruhi terhadap penilaian sesuatu realitas.

### **E. Ideologi Media**

Ideologi bagi Marx merupakan suatu konsep yang tidak abstrak, ideologi merupakan piranti, yang dengannya ide-ide dari kelas berkuasa dapat diterima di dalam masyarakat sebagai suatu yang normal dan natural.

Mengutip paradigma Peter D.Moss dalam Eriyanto (2002:119), Ideologi media massa menghasilkan wacana media massa berupa konstruk kultural, termasuk berita sural kabar. Hal ini menjadikan suatu kesimpulan bahwa sebuah ideologi media massa dapat tercermin dari isi media massa berupa produk dari media massa tersebut. Menurut Eriyanto (2002:123), isi dari sebuah media dipengaruhi oleh tiga pendekatan utama, yakni:

1. Pendekatan politik ekonomi media seperti faktor pemilik media, modal dan kekuatan politik ekonomi diluar pengelolaan media.
2. Pendekatan organisasi media berupa hasil dari mekanisme yang ada dalam ruang redaksi seperti praktik kerja, profesionalisme dan tata aturan serta kebijakan redaksi.
3. Pendekatan kulturalis, yang berupa gabungan antara pendekatan politik ekonomi dan pendekatan organisasi dalam ruang pemberitaan.

Ideologi sebuah media massa tidak hanya dapat dilihat dari isi media, tetapi salah satunya juga dapat dilihat dari sisi sebuah pendiri institusi media. Seperti

yang diungkapkan oleh Edward Herman dan Noam Chomsky (2006), bahwa pendiri institusi media memegang peranan yang penting sebagai *filter* dari sebuah media massa.

a. Konsep ideologi media oleh Pamela J Shoemaker

Media berperan mendefinisikan bagaimana realitas seharusnya dipahami, bagaimana realitas itu dijelaskan dengan cara tertentu kepada khalayak. Media di sini berfungsi menjaga nilai-nilai kelompok, dan mengontrol bagaimana nilai-nilai kelompok itu dijalankan. Salah satu kunci dari fungsi semacam ini adalah bidang atau batas budaya. Untuk mengintegrasikan masyarakat dalam tata nilai yang sama, pandangan atau nilai harus didefinisikan sehingga keberadaannya diterima dan diyakini kebenarannya. Dalam kerangka ini, media dapat mendefinisikan nilai dan perilaku yang sesuai dengan nilai kelompok dan perilaku atau nilai apa yang dipandang menyimpang. Perbuatan, sikap, atau nilai yang menyimpang tersebut bukanlah sesuatu yang alamiah (*nature*), yang terjadi dengan sendirinya, dan diterima begitu saja. Semua nilai dan pandangan tersebut bukan sesuatu yang terbentuk begitu saja, melainkan dikonstruksi. Lewat konstruksi tersebut, media secara aktif mendefinisikan peristiwa dan realitas sehingga membentuk kenyataan apa yang layak, apa yang baik, apa yang sesuai, dan apa yang dipandang menyimpang (Eriyanto, 2002:119)

Dalam produksi berita, yang menjadi dasar dari proses produksi berita adalah adanya semacam konsensus: bagaimana suatu peristiwa dipahami bersama dan dimaknai. Di sini ada dua pengertian: pada satu sisi peristiwa dan aktor yang direstui dan pada sisi lain adalah peristiwa dan perilaku yang dikeluarkan dari

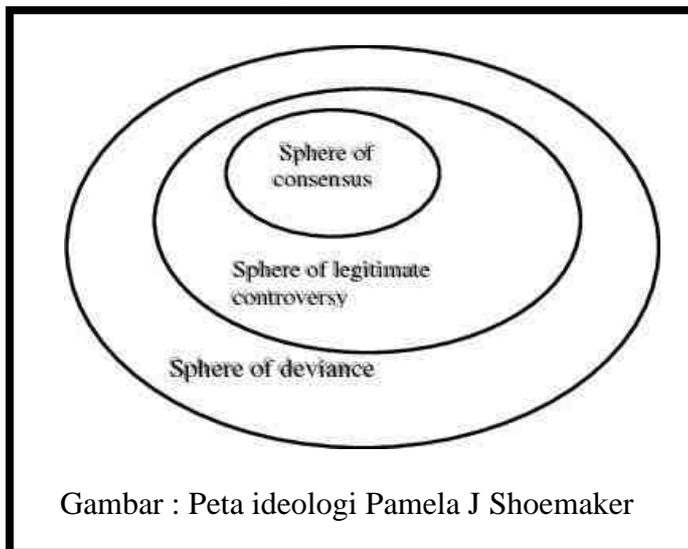
pembicaraan. Konsensus menyediakan suatu kesatuan: satu negara, satu masyarakat, satu budaya dan seringkali juga diterjemahkan sebagai “kami”: industri kami, kebutuhan kami, ekonomi kami, sistem pemerintahan kami, sistem demokrasi kami, dan sebagainya. Melalui konsensus ini realitas yang beragam dan tidak beraturan diubah menjadi realitas yang mudah dan bisa dikenali, sesuatu yang plural menjadi tunggal. Lewat konsensus ini, terjadi proses homogenisasi bahwa kita adalah satu: kita mempunyai ketertarikan, minat dan kekuasaan yang sama dalam masyarakat. Dalam model konsensual ini, diandaikan terjadi *share* politik, ekonomi, dan budaya di antara anggota masyarakat di mana masing-masing orang menyerap nilai-nilai yang sama sebagai bagian dari anggota atau komunitas politik, ekonomi, dan budaya tertentu.

Stuart Hall menyebut model konsensus sebuah produksi teks berita sebagai asumsi latar (*background assumption*). Istilah tersebut dipakai oleh Hall untuk menyebut bagaimana anggota komunitas *share* terhadap pengetahuan dan bahasa yang sama, mereka seakan terikat oleh budaya dan komunitas yang sama sebagai sesama anggota. (Eriyanto, 2002:124) Basis kepercayaan dan kultural yang sama tersebut pada akhirnya menyediakan budaya yang sama dan diasumsikan hanya ada satu perspektif dalam melihat suatu peristiwa: menyediakan suatu pandangan yang kadang disebut sebagai budaya, atau sistem nilai. Melalui itu, perilaku dan berita yang dihasilkan oleh wartawan berada dalam nilai-nilai yang telah disepakati bersama.

Peristiwa juga dibingkai dan dilihat dalam kerangka dan tata nilai tersebut. Kenapa peristiwa dipahami dalam perspektif dan kerangka seperti ini dan bukan

dengan kerangka atau perspektif yang lain, di antaranya didasarkan pada kesepakatan atau tata nilai yang dipahami dan disepakati bersama dalam komunitas. Kelompok yang berada di luar itu akan dipandang sebagai menyimpang (*deviant*) dan dipinggirkan dalam pembicaraan. Peristiwa atau aktor dipandang dengan ketidaksetujuan dan dimarginalkan dalam pembicaraan. Pandangan yang negatif atau marginal mengenai sesuatu didasarkan pada konsensus yang bekerja dalam suatu proses pemberitaan.

Dalam model Hall, penantang atau orang yang menyimpang tidaklah diciptakan dan dibentuk secara sengaja oleh otoritas tertentu tetapi lewat kesepakatan bersama. Di sini memang ada perbedaan yang mendasar antara negara yang menganut sistem totaliter dengan negara pluralis/liberalis. Dalam sistem totaliter, diterapkan aturan tertentu, yang tidak memenuhi aturan tersebut dipandang sebagai pembangkang (*dissident*). Sebaliknya, dalam negara yang demokratis/pluralis, proses tersebut tidak melalui jalur paksaan, tidak dilakukan dengan jalan kekerasan. Karenanya, mereka yang dipandang tidak sesuai dengan konsensus dipandang sebagai menyimpang (*deviant*). Nilai dan konsensus yang ada dalam masyarakat yang akan mengkategorisasikan perilaku atau peristiwa sebagai tidak normal, tidak rasional, menyimpang, tidak sesuai dengan aturan, dan sebagainya.



Sumber : Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, 2002:127

Peta ideologi Shoemaker membagi dunia jurnalistik ke dalam tiga bidang: bidang penyimpangan (*sphere of deviance*), bidang kontroversi (*sphere of legitimate controversy*), dan bidang konsensus (*sphere of consensus*). Bidang-bidang ini menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa dipahami dan ditempatkan oleh wartawan dalam keseluruhan peta ideologis.

Bingkai terluar yakni bidang penyimpangan (*Sphere of deviance*) menyertakan nilai-nilai yang dipahami dan disepakati secara bersama oleh anggota komunitas. Bidang kedua adalah wilayah kontroversi (*Sphere of controversy*). Kalau pada bidang yang paling luar ada kesepakatan umum bahwa realitas (peristiwa, perilaku, atau gagasan) dipandang menyimpang dan buruk, dalam area ini realitas masih diperdebatkan/ dipandang kontroversial. Sedangkan wilayah yang paling dalam adalah konsensus (*Sphere of consensus*) menunjukkan

bagaimana realitas tertentu dipahami dan disepakati secara bersama-sama sebagai realitas yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi kelompok.

Sebagai area ideologis, peta semacam ini dapat dipakai untuk menjelaskan bagaimana perilaku dan realitas yang sama bisa dijelaskan secara berbeda- karena memakai kerangka yang berbeda. Masyarakat atau komunitas dengan ideologi yang berbeda akan menjelaskan dan meletakkan peristiwa yang sama tersebut ke dalam peta yang berbeda, karena ideologi menempatkan bagaimana nilai-nilai bersama yang dipahami dan diyakini secara bersama-sama dipakai untuk menjelaskan berbagai realitas yang hadir setiap hari.

Wilayah ideologis seperti yang digambarkan dalam peta Hall ini menolong untuk menjelaskan bagaimana peristiwa diberitakan oleh wartawan dalam pemberitaannya. Inti dari teori ini adalah ada banyak cara bagaimana perilaku direkonstruksi dan dibentuk menjadi perilaku yang menyimpang, seringkali dengan cara yang halus dan tidak langsung. Dengan membuat seleksi, memilih peristiwa tertentu, membingkai peristiwa dengan bingkai tertentu, peristiwa yang hadir di tengah publik bisa jadi berbeda dengan apa yang terjadi sebenarnya.

Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah ideologi yang ada dalam sebuah media massa dapat mempengaruhi bagaimana sebuah peristiwa di bingkai oleh sebuah media tersebut.

#### b. Konsep ideologi media oleh Antonio Gramsci

Antonio Gramsci melihat media sebagai sebuah ruang dimana berbagai ideologi direpresentasikan. Ini berarti di satu sisi media bisa menjadi sarana

penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol atas wacana publik (Sobur,2006).

Namun di sisi lain, media bisa menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan. Kesimpulannya adalah media massa bukan sesuatu yang bebas, independen, tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial karena ada berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa.

Kepentingan-kepentingan yang ada dalam media massa antara lain meliputi kepentingan kapitalisme pemilik modal, kepentingan keberlangsungan (sustainability) lapangan kerja bagi para karyawan dan sebagainya. Dalam kondisi dan posisi seperti ini, media massa tidak mungkin berdiri statis di tengah-tengah, dia akan bergerak dinamis di antara kepentingan-kepentingan yang sedang bermain.

Karena media massa memiliki keterkaitan dengan realitas sosial, hal ini membuat media massa terpengaruh oleh berbagai macam kepentingan yang melingkupinya. Teori ini membantu penelitian bahwa media massa dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang bermain di dalamnya.

#### c. Konsep Objektivitas Media oleh Shoemaker dan Reese serta Tuchman

Menurut Shoemaker dan Reese, objektivitas lebih merupakan ideologi bagi jurnalis dibandingkan seperangkat aturan atau praktik yang disediakan oleh jurnalis. Dalam pandangan Tuchman, objektivitas adalah 'ritual' bagi proses pembentukan dan produksi berita. Ia adalah sesuatu yang dipercaya, menjadi bagian dari ideologi yang disebarkan oleh dan dari wartawan. Realitas itu sendiri begitu kompleksnya, tidak beraturan dan seringkali acak. Peristiwa juga

merefleksikan bukan hanya kompleksitas peristiwa, melainkan juga saling berhubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Objektivitas itu dalam proses produksi berita secara umum digambarkan sebagai tidak mencampuradukkan antara fakta dan opini. Berita adalah fakta dan karenanya dalam proses pencarian berita (*news gathering*) dan penulisan berita, sama sekali tidak boleh terdapat opini. (Eriyanto,2002:27)

Teori objektivitas dapat membantu untuk mengungkap bagaimana proses produksi sebuah berita yang objektif menurut Shoemaker dan Reese serta Tuchman.

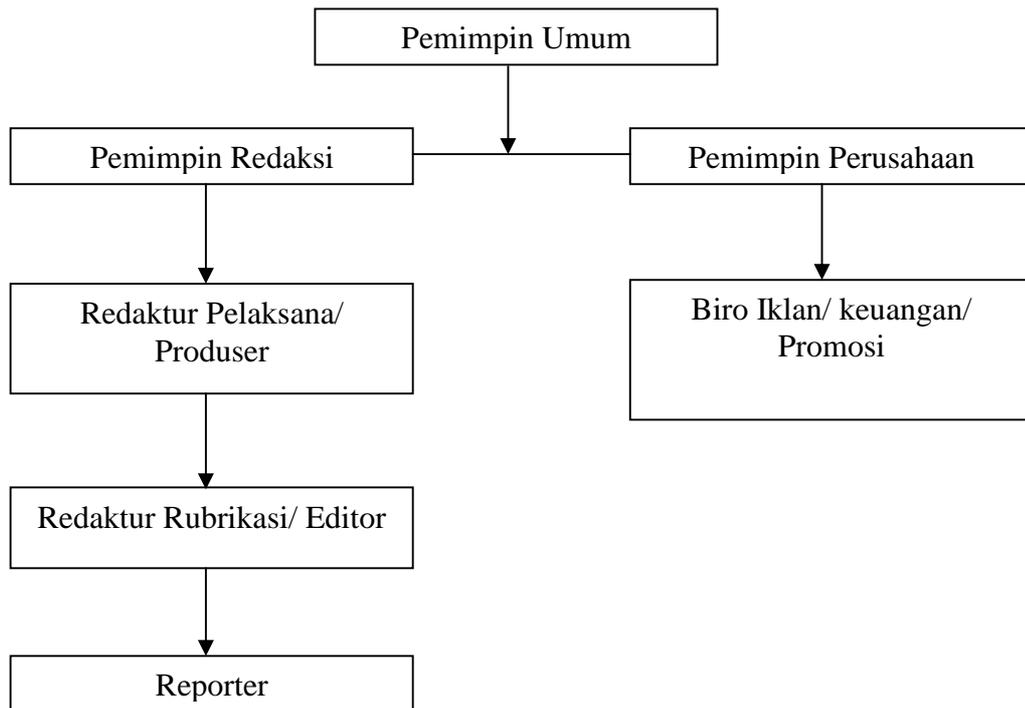
#### **F. Proses Kerja dan Kebijakan Media Massa**

Kehadiran media telah membuat dunia semakin kecil. Pendapat ini dikemukakan oleh Marshal Mc Luhan dalam komunikasi massa dengan analogi "*global Vilage* "( desa global) yang mentransmisikan setiap pesan menuju halayak dengan beragam saluran-saluran media baik cetak maupun elektronik (Ardianto, 2007: 104).

Proses kerja media massa dengan beragam saluran-saluran komunikasi amat bergantung pada chanel yang berfungsi sebagai "gerbang" dalam saluran komunikasi. Gerbang yang dimaksud adalah seperangkat aturan yang menjadi proses seleksi dalam media massa yang dilekatkan dengan pengistilahan *Gate Keeper* yang memiliki kuasa secara internal media maupun diluar dari media itu sendiri. Selain *Gate Keeper* media juga ditentukan oleh gate keeping yang bertugas sebagai pencari berita yang sering dilekatkan pada profesi Jurnalis

(Berkowitz, 1997:61-62). Secara umum dalam kebijakan redaksional media massa tergambar dalam sebuah alur produksi :

### Gambaran umum Mekanisme Kerja Media Massa



*Sumber : Komunikasi Massa (Ardianto, 2007: 37)*

Gambaran diatas, merupakan deskripsi umum dari alur kerja media massa yang umumnya dipakai oleh media cetak. Dari mekanisme kerja ini dapat diamati bagaimana proses kerja dari sebuah berita yang mengalami tahapan seleksi yang panjang dari sebuah gerbang informan atau narasumber yang bernilai berita.

Dalam pandangan Chomsky (dalam Cogswell, 2006) bahwa pemilik modal senantiasa sebagai pengontrol terbesar dari kebijakan sebuah media massa yang berhubungan dengan alat kuasa yang dimiliki. Tanpa sadar pemilik media

senantiasa menjaga jaringan korporasi yang dimiliki dan sekaligus menjadi agen seleksi terbesar bagi kepentingan-kepentingan yang dimiliki.

Pada tahap selanjutnya proses seleksi yang berlangsung adalah dalam kebijakan pelaksana media yakni pemimpin redaksional ataupun pemimpin perusahaan. Pada tahap ini, media senantiasa mengarahkan agenda media yang menjadi *positioning* media itu sendiri.

Setelah melewati tahapan seleksi positioning, maka selanjutnya gerbang informasi sebelum menjadi sebuah berita dirumuskan menjadi bagian tematik oleh para redaktur maupun editor yang akan mengolah pesan-pesan dari reporter yang dikumpulkan dari narasumber yang memiliki nilai berita yang menarik.

### **G. Nilai Berita dan Sudut Pandang Wartawan**

Dalam menjalankan proses jurnalisme untuk mencari, mengumpulkan, serta menuliskan sebuah berita, wartawan pada tahap awal mesti memiliki kemampuan dalam melihat sudut pandang pemberitaannya. Sudut pandang atau angle pemberitaan senantiasa tergantung pada nilai sebuah berita.

Pengelompokan sebuah nilai berita pertama kali diberikan oleh Wilbur Schramm dalam tulisannya yang berjudul “The Nature of News” dalam *Jurnalistik teori dan praktek* karangan Hikmat dan Purnama Kusumaningrat (2007:61). Dalam pandangan Schramm, nilai berita adalah asumsi-asumsi intuitif dari seorang wartawan tentang apa yang menarik bagi khalayak tertentu, yakni apa yang menjadi perhatian mereka.

Kriteria tentang nilai berita atau unsur- unsur berita yang pada saat ini banyak digunakan adalah sebagai berikut ;

- Aktualitas (*Time Lines*) ; Persaingan membutuhkan kecepatan karena sifat khalayak yang membutuhkan berita yang ingin mereka ketahui secara cepat. Bagi sebuah media Semakin aktual berita-beritanya berarti semakin berarti semakin baru peristiwa yang terjadi semakin tinggi nilai beritanya.

- Kedekatan (*proximity*) ; peristiwa yang mengandung kedekatan dengan pembaca akan menarik perhatian. Stieler dan Lippman menyebutkan hal ini sebagai kedekatan Geografis dan emosional.

- Keterkenalan (*prominence*) ; Dalam memilih berita unsur prominence merupakan bagian penting, bahkan dikatakan dengan sebuah kalimat yang begitu baik “*personages make news dan News about prominent person make copy*” secara umum kalimat ini bisa diartikan Nama membuat sebuah berita.

- Dampak (*consequence*); nilai berita harus memperhitungkan dampak dari pemberitaanya. Semakin besar dampak dari pemberitaanya semakin besar pula nilai dari sebuah berita, sehingga pada umumnya para jurnalis senantiasa mencari berita yang memberikan efek besar bagi khalayak.

- *Human Interest*. Definisi umum bagi penjelasan mengenai Human Interest yakni nilai berita yang mengandung unsur empati. Inti dari Human Interes adalah pengejawantahan dari pesan-pesan universal bagi masyarakat luas yang mampu memberikan efek psikologis bagi *audience*.

Nilai berita senantiasa memberikan pengaruh besar bagi Jurnalis dalam menentukan angle pemberitaanya. Unsur-unsur inilah yang menjadi kebijakan umum dalam mengolah serta mengangkat sebuah topik pemberitaanya.

#### **H. Anarkisme Sebagai Sebuah Teori Sosial**

Antagonisasi terhadap anarkisme sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Terlebih sejak kehadiran media massa yang oleh beberapa pemikir sosial tidak lebih sebagai perpanjangan tangan dari kekuasaan. Sebagai paham sosial yang menhendaki penghapusan segala bentuk eksploitasi dan kekuasaan sentralistik anarkisme banyak mendapatkan tantangan dari paham-paham sosial lainnya. Sebagian memaknai anarkisme sebagai varian sosialisme yang merupakan lawan dari kapitalisme. Namun lebih dari itu, anarkisme hadir sebagai paham yang menentang segala bentuk paham yang meniscayakan keberadaan kelas sosial dalam masyarakat.

Anarkisme adalah teori politik yang bertujuan menciptakan anarki, ketiadaan tuan, tanpa raja yang berkuasa. Dengan kata lain, anarkisme adalah teori politik yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang di dalamnya individu bebas berkumpul bersama secara sederajat. Anarkisme macam itu melawan semua bentuk kontrol hierarkis-baik kontrol oleh negara maupun kapitalis- karena merugikan individu dan individualitas mereka. Namun demikian tidak diragukan lagi, anarkisme dan anarki adalah gagasan yang paling banyak disalah mengerti dalam teori politik. Umumnya, kata-kata tersebut digunakan untuk mengartikan “chaos”, atau “tanpa tatanan,” dan akibatnya, kaum anarkis

dianggap menginginkan kekacauan social serta kembali ke “hukum rimba”. (FAQ Anarkisme, A1)

Kesalahpahaman proses ini bukan tanpa sejarah. Contohnya, di negara yang dipimpin oleh satu orang (monarki) kata “republik” atau ‘demokrasi’ digunakan dengan arti yang sama seperti “anarki”, untuk menunjukkan ketidak tertiban dan kebingungan. Mereka yang memiliki kepentingan tertentu dengan adanya status quo tak pelak lagi ingin menunjukkan bahwa pada prakteknya sistem yang berlawanan tak dapat bekerja, dan bahwa bentuk masyarakat yang baru hanya akan membawa kekacauan.

Kata “anarki” berasal dari bahasa Yunani, awalan an (atau a), berarti “tidak”, “ingin akan”, “ketiadaan”, atau “kekurangan”, ditambah archos yang berarti “suatu peraturan”, “pemimpin”, “kepala”, “penguasa”, atau “kekuasaan”. Meski kata-kata Yunani anarchos dan anarchia seringkali diartikan “tidak memiliki pemerintah” atau “ada tanpa pemerintah”, seperti yang dapat dilihat, arti orisinal anarkisme yang tepat bukanlah sekedar “tidak ada pemerintah”. “Anarki” berarti “tanpa suatu peraturan” atau lebih umum lagi, “tanpa kekuasaan”, dan dalam pemahaman inilah kaum anarkis terus menggunakan kata ini.

Anarkisme dapat dipahami sebagai pemikiran umum mengenai sosial dan politik yang mengekspresikan pengingkaran terhadap semua kekuasaan, kedaulatan, dominasi, dan divisi yang hierarkis, serta merupakan sebuah kehendak untuk menghancurkannya. Oleh karena itu anarkisme lebih dari sekedar anti Negara, bahkan jika pemerintah (negara) merupakan fokus sentral yang tepat dari kritik kaum anarkis.

Kaum anarkis, meski memiliki beberapa pemikiran kunci yang sama, dapat dikelompokkan ke dalam kategori, tergantung pada tatanan ekonomi yang mereka anggap paling sesuai bagi kebebasan manusia. Namun demikian semua jenis anarkis memiliki sebuah pendekatan dasar. Mengutip kata-kata Rudolf Rocker:

“Bersama dengan pendiri sosialisme, kaum anarkis menuntut menghapus semua monopoli ekonomi serta kepemilikan bersama atas tanah dan semua sarana produksi lainnya, yang harus dimanfaatkan oleh semua tanpa pembedaan; karena kebebasan sosial dan personal hanya dapat dipahami pada dasar keuntungan ekonomi yang setara bagi setiap orang. Dalam gerakan sosialis sendiri kaum anarkis menunjukkan sudut pandang bahwa perang melawan kapitalisme harus bersamaan juga berperang melawan semua institusi kekuasaan politis, karena dalam sejarah, eksploitasi ekonomi selalu bekerja sama dengan penindasan sosial politik. Eksploitasi dan dominasi orang terhadap sesamanya tidak dapat dipisahkan, dan masing-masing saling mengkondisikan.” (Anarcho Syndicalism, hal 17-18)

Berikut ini merupakan konteks umum yang menjadi ketidaksepakatan kaum anarkis. Perbedaan utama berada di antara kaum anarkis “individualis” dan “sosial”, meskipun keinginan tatanan ekonomi masing-masing tidaklah eksklusif. Yang kedua, kaum anarkis sosial (anarkis komunis, sindikalis anarko, dan lain-lain) selalu menjadi mayoritas, dengan anarkisme individualis yang hanya terbatas di Amerika Serikat. Dalam bagian ini kami menunjukkan perbedaan di antara kedua aliran utama ini dalam gerakan anarkis. Seperti yang telah dijelaskan, meski kaum anarkis sosial dan individualis sama-sama melawan negara dan kapitalisme, mereka tidak sepakat mengenai situasi masyarakat bebas dan bagaimana untuk mencapainya. Singkatnya, kaum anarkis sosial, lebih menyukai solusi komunal terhadap masalah sosial dan visi komunal bagi masyarakat yang baik contohnya masyarakat yang memprotes dan mendorong kebebasan individu.

Kaum anarkis individualis, seperti namanya, lebih menyukai solusi individu dan memiliki visi yang lebih individualistis mengenai masyarakat yang baik. Namun, kita tidak boleh membiarkan perbedaan-perbedaan ini menutupi tujuan bersama oleh kedua aliran ini, yaitu keinginan untuk memaksimalkan kebebasan individu dan mengakhiri dominasi serta eksploitasi negara dan kapitalis.

Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno pernah menulis dalam Harian Pikiran Ra'jat tahun 1923 yang diterbitkan ulang oleh Jawa Pos pada 6 September 2006 dengan revisi ejaan mengikuti kaedah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

Salah satu faham dari *socialisme* ialah *anarchisme*. Perkataan *anarchisme* itu adalah terdiri dari perkataan *A*, *archi* dan *isme*. *A* artinya tidak. *Archie* artinya memerintah. *Isme* artinya faham. Jadi makna *anarchisme* ialah salahsatu faham yang tidak suka sama pemerintahan. *Anarchisme* ialah salahsatu faham atau aliran dari *socialisme*, oleh karenanya *anarchisme* itu adalah lawannya kapitalisme.

Seorang *anarchist*, ialah pemeluk faham *anarchisme* itu, tidak suka dengan milik (*eigendom*), oleh karena hak milik itu lahirnya dari kapitalisme. Selain daripada itu *anarchisme* itu tidak mufakat dengan tiap-tiap pemerintahan, oleh karena katanya bagaimana demokratis atau kerakyatan pula pemerintahan itu di dalam hakikatnya, tiap-tiap pemerintahan itu mengandung paksaan. Menurut paham *Anarchisme*, seseorang yang hidup di dalam masyarakat itu berhak atas kemerdekaan seluas-luasnya. Hanyalah pergaulan hidup yang terdiri dari orang-orang yang merdeka itu bisa tentram dan teratur betul. Menurut fahamnya, pergaulan hidup manusia itu bisa beres jika pemerintahan yang bersendi kepada kekuasaan, dan kekuasaan ini yang melahirkan *wet-wet* itu, dihapuskan.

Oleh karena itu faham *anarchisme* ini *anti-gezag*, ialah tidak mufakat dengan kekuasaan: *antiwettisch*, tidak mufakat dengan *wet*; dan *antiregeering*, tidak mufakat dengan pemerintahan. Selain daripada itu faham *anarchisme* itu antimiliteris, ialah tidak mufakat dengan balatentara. Tidak mufakatnya itu oleh karena militerisme ini adalah suatu *stelsel* yang mengandung paksaan yang hebat sekali. Oleh karena militerisme ini maka pemuda-pemuda yang

bisa bekerja di dalam pabrik-pabrik harus ditutup di dalam benteng-benteng. *Anarchisme* itu menentangi patriotisme yang hanya mengabdikan kepada cinta tanah air. Patriotisme yang *kunstmatig* yang dihidup-hidupkan di dalam sanubarinya orang-orang yang tidak bertanah-air, oleh karena di dalam tanah-airnya sendiri mereka menderita kelaparan, kesengsaraan dan perbudakan. Patriotisme yang jadi agama baru, yang memisah-misahkan rakyat yang seharusnya hanya mempunyai tanah-air satu ialah *menschheid*. Juga mereka itu tidak mufakat dengan hakim dan polisi. Juga dengan *wettelijk huwelijk*, ialah perkawinan menurut *wet*, mereka tidak mufakat, oleh karena *wettelijk huwelijk* ini menjadi sebab orang perempuan tidak merdeka. Mereka tidak mufakat dengan minum-minuman keras. Minuman keras ini merusakkan manusia lahir dan batin.

Kaum *Anarchist* mufakat sekali dengan persamaan milik, oleh karena persamaan milik itu adalah sesuatu hak dari manusia yang dapat menyelamatkan pergaulan hidup manusia. Hak persamaan milik itu menentukan hak-haknya seseorang atas alat-alat pembikinan barang dan atas syarat-syarat bagi kebutuhannya manusia. Dengan adanya, hak persamaan milik itu, maka aturan merampas pekerjaan lain orang akan lenyap, oleh karena semua sifat perburuhan itu tidak ada lagi. Seseorang bisa bekerja bagi dirinya sendiri.

*Anarchisten* itu mufakat sekali dengan *persoonlijkje vrijheid*, ialah kemerdekaan sendiri-sendiri, oleh karena kemerdekaan itu adalah haknya alam yang tidak bisa dihancurkan. Semua kemajuan itu terutama membesarkan *persoonlijkje vrijheid* itu, oleh karena *persoonlijkje vrijheid* ini adalah satu alat yang terbaik bagi manusia untuk hidup bersama-sama yang rukun, tentram dan dimana seseorang itu bisa hidup menurut wataknya sendiri-sendiri ialah pergaulan hidup yang harmonis. Batasnya kemerdekaannya seseorang itu ialah kemerdekaannya orang dengan siapa ia itu hidup. Hanyalah di dalam keadaan merdeka seseorang itu bisa mendapat bahagia di hidupnya. Ketidakmerdekanya orang lain itu akan mengurangi sekali bahagianya sendiri dan oleh karena itu maka adalah kewajibannya seseorang bagi mencapai bahagianya sendiri haruslah menghormati kemerdekaannya lain orang.

Kaum *Anarchist* mufakat sekali dengan perhubungan merdeka antara lelaki dan perempuan, oleh karena hanyalah perhubungan merdeka antara kedua pihak itu itu mengasih ketentuan kepada orang perempuan hidup merdeka. Perhubungan yang bersendi atas cinta di antara perempuan dan lelaki bisalah mendatangkan kemerdekaan untuk bergaul dan untuk memilih ialah kedua syarat

yang dapat melahirkan cinta yang sejati. Cinta yang sejati ini tidak bisa lahir *zonder* kemerdekaan memilih.

Kaum *Anarchist* itu setuju sekali dengan pendidikan yang merdeka, dengan *vrije ontwikkeling*, ialah tumbuh merdeka dengan kemerdekaan berbicara dan kemerdekaan berkumpul, oleh karena ini semua adalah syarat-syarat bagi hidupnya masyarakat yang bersendi atas *rede* ialah budi. Hanyalah sesudahnya kemerdekaan itu merajalela maka ilmu *wetenschap* dan seni bisa berkembang dan oleh karena mana mengasih bahagia dan kekuatan kepada masyarakat.

Kaum *Anarchist* adalah menganjuri persaudaraan yang kekal yang lahirnya dari batin, bukan oleh karena paksaan dan didikan yang *kunstmatig*. Menurut faham *anarchisme* orang itu adalah mahluk yang suka bercampur-gaul dan tidak bisa dipisahkan dari keadaan dimana ia ditempatkan. Persaudaraan itu adalah lahirnya perasaan dan budi pekerti yang suci dan luhur, oleh karena manusia itu menurut *natuur*nya harus hidup bersama-sama. Tetapi tiap-tiap orang itu merdeka memilih dengan siapa ia mau bergaul. Semua hal yang memisah-misahkan manusia seperti warnanya muka, bahasa, bangsa, agama, politik itu harus dilenyapkan dan harus dicari apa yang bisa mempersatukan semua manusia.

Menurut faham *Anarchisme* bukanlah masyarakat yang terpenting tetapi individu, ialah seseorang yang di dalam masyarakat itu yang terpenting. Tinggi dan rendahnya tingkatannya masyarakat itu ditetapkan oleh kualitasnya seseorang dari siapa pergaulan hidup itu sendiri. Seseorang hidup dan tumbuh menurut wataknya sendiri-sendiri dan juga menurut *aanleg*nya atau kodratnya sendiri-sendiri. Tiap-tiap kemajuan itu ialah terjadi dari tumbuhnya dan lahirnya benih-benih yang tersimpan dan hidup di dalam seseorang. Oleh karena itu *anarchisme* itu di dalam hakikatnya ialah teori individualisme, teori yang menghargakan manusia lebih dari masyarakat. (<http://anarkis.org/anarchisme/>)